



Call for Papers



MATRA PEMBARUAN

(Nomor Akreditasi: 14/E/KPT/2019 (SINTA 3))

Mengundang para peneliti, dosen, mahasiswa, dan masyarakat umum untuk mempublikasikan hasil-hasil riset mutakhir di Jurnal Matra Pembaruan Volume 2020, yang akan diterbitkan pada dua edisi yaitu **Mei dan November**.

Naskah merupakan karya ilmiah orisinal yang belum pernah dipublikasikan dan tidak memuat unsur plagiat



Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris sebanyak 38.000 s.d 40.000 karakter (tanpa spasi) sudah termasuk referensi, daftar pustaka, dan tabel (jika ada). Naskah dalam Bahasa Indonesia disertai abstrak Bahasa Inggris, dan sebaliknya.



Naskah yang dikirimkan berupa resume hasil penelitian, bagian dari skripsi, tesis, atau disertasi yang telah mengalami penyesuaian untuk standar jurnal ilmiah. Artikel mengandung unsur temuan baru, yang merespons isu-isu dan wacana kontemporer terkait inovasi kebijakan

Sumber referensi minimal 10 sumber yang berasal dari jurnal ilmiah yang bisa diakses melalui daring (*online*).



Sistematika penulisan terdiri dari empat pembabakan: Pendahuluan, Metode, Hasil dan Pembahasan, dan Kesimpulan. Sedangkan gaya gaya APA (*American Psychological Association*) Lampirkan alamat korespondensi dan penulisan referensi dan kutipan MP menggunakan nomor telepon penulis.

Registrasi dan submit artikel anda di
<http://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/mp>

Jl. Kramat Raya, No 132, Senen, Jakarta Pusat
0858 1325 8250/Rifky (Whatsapp Only)
matrapembaruan@gmail.com

Google Scholar

MORAREF

neliti

GARUDA
GARDA RUJUKAN DIGITAL

Crossref

MEMASUKI masa periode kedua pemerintahannya, Presiden Joko Widodo menginginkan agar struktur birokrasi kementerian dan lembaga dirampingkan, dari semula empat eselon menjadi dua eselon, menyisakan eselon I dan II. Sementara untuk eselon III dan IV bakal dialihkan menjadi pejabat fungsional yang menekankan pada keahlian dan kompetensi tertentu. Langkah ini diyakini mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terkait perizinan dan investasi, yang muaranya menghadirkan kesejahteraan bagi bangsa.

Arahan itu kemudian direspons kementerian dan lembaga, tak terkecuali Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kemendagri membentuk tim khusus untuk mengurus agenda tersebut. Tim itu mengemban dua tugas, yakni menyederhanakan organisasi di lingkup internal Kemendagri dan pemerintahan daerah. Untuk internal Kemendagri, para komponen diminta mengusulkan penyederhanaan yang bakal dilakukan dengan tetap mempertimbangkan sejumlah aspek.

Dengan isu yang bergulir tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) pun turut memberi perhatiannya. Terlebih BPP Kemendagri merupakan organisasi yang mestinya lebih condong ke fungsional ketimbang struktural.

Diskusi di internal BPP Kemendagri,

mengharapkan adanya kajian mendalam yang perlu ditempuh untuk menghadirkan perubahan yang berkualitas. Selain itu, peralihan jabatan struktural ke fungsional agar tidak dilakukan sembarangan. Sebab, jenis jabatan tersebut dinilai melibatkan rasa minat seseorang. Karenanya, upaya pembacaan minat dan potensi kepada aparat sipil negara perlu ditunaikan untuk menuntun pilihan.

Terkait hal itu, pada edisi Februari 2020, *Media BPP* berupaya mengangkat wacana perihal penyederhanaan struktur birokrasi tersebut ke publik terutama yang dilakukan Kemendagri, dan BPP Kemendagri. *Media BPP* juga memotret bagaimana langkah Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) dalam melakukan penyederhanaan di tubuh organisasinya. BKF merupakan salah satu organisasi yang mengubah strukturnya di tengah isu penyederhanaan bergulir.

Selain perihal penyederhanaan birokrasi, beragam informasi menarik lainnya juga telah disajikan ke dalam aneka rubrik.

Dengan berbagai narasi yang dihadirkan tersebut, merupakan upaya *Media BPP* untuk tetap komitmen menghadirkan informasi yang membangun kepada publik. Melalui ikhtiar ini, diharapkan BPP Kemendagri dapat hadir dalam bentuk dan kerja yang berkualitas. Supaya perannya makin menggemakan dan mampu menghadapi setiap tantangan zaman. Selamat membaca.



Redaksi...

MEDIA BPP

PELINDUNG MENTERI DALAM NEGERI, TITO KARNAVIAN
PENANGGUNG JAWAB AGUS FATONI

PEMIMPIN REDAKSI	HORAS MAURITS PANJAITAN
REDAKTUR PELAKSANA	AJI NUR CAHYO
REDAKTUR	KURNIASIH ACHMAD JANI RIVAI YUSUF HORAS MAURITS PANJAITAN MATHEOS TAN
PENYUNTING	FRISCA NATALIA
PELIPUTAN	MUJAENI SAIDI RIFKY
PENATA LETAK	SAIDI RIFKY
ILUSTRASI COVER	TRES AUGUST
INFOGRAFIK	FAJAR HARAMUKTI

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

ALAMAT REDAKSI
JALAN KRAMAT RAYA NO. 132, JAKARTA PUSAT
PID@LITBANGKEMENDAGRI.COM

Penelitian Kualitatif

Selama ini penelitian di Indonesia pada umumnya dan BPP Kemendagri pada khususnya dianggap terlalu kualitatif dan kurang kuantitatif, kedepannya dengan adanya formasi Statistisi di BPP Kemendagri pada pembukaan CPNS tahun ini bisa mendorong kerja sama yang baik antara Peneliti dan Statistisi sehingga diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas kajian penelitian di BPP Kemendagri.

- Pembaca Media BPP-

Sejauh ini penelitian di BPP Kemendagri memang lebih banyak kualitatif, selain memungkinkan dilakukan karena penelitian sosial, juga dikarenakan pendekatan ini dipandang tepat karena kasus yang diteliti selama ini dianggap bersifat multidimensional. Di sisi lain, fasilitas olah data menggunakan sistem dalam penelitian kuantitatif juga masih sangat minim, berkelindan dengan kemampuan sumber daya manusia di BPP Kemendagri. Untuk itu, harapannya di masa mendatang, BPP Kemendagri bisa memiliki fasilitas yang memadai untuk menunjang proses penelitian.

Redaksi

Pengawasan Keuangan Daerah

Penggunaan dana transfer daerah selama ini hanya dapat diakses oleh sebagian masyarakat. Karena masalah transparansi tersebut, banyak masyarakat beranggapan, jika dana transfer ke daerah rawan diselewengkan. Bahkan tidak jarang terjadi kecurangan dan kebocoran, sehingga masuk dalam wilayah tindak pidana korupsi. Sejauh ini belum ada upaya nyata dari Kemendagri sebagai pembina pemerintah daerah. Pengawasan Kemendagri ini menjadi sangat penting karena kita tahu bahwa hampir separuh dari keuangan negara itu larinya ke daerah.

- Pembaca Media BPP-

Kemendagri terus mendorong setiap anggaran dari Pemerintah Pusat dan dana pendapatan asli tiap daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien sehingga hasil bisa maksimal. Belum lama ini Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menandatangani Nota Kesepahaman Elektronifikasi Transaksi Non Tunai Pemerintah Daerah bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia; dan Menteri Komunikasi dan Informatika. Elektronifikasi ini dimaksudkan agar pemerintah daerah menjalin kerja sama dengan perbankan yang sehat di daerahnya masing-masing, baik Bank Daerah maupun Bank Umum, untuk dapat bersinergi dalam mengefektikan pelaksanaan elektronifikasi pada pemerintah daerah. Selain itu, pemerintah daerah wajib melakukan inovasi elektronifikasi dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga dapat mewujudkan program pengamanan fiskal daerah serta inovasi elektronifikasi dalam pelaksanaan belanja daerah untuk membiayai program dan kegiatan pemerintah daerah, melalui pembangunan aplikasi keuangan daerah yang terintegrasi dengan Perbankan. Gerakan tersebut merupakan bagian dari gerakan anti korupsi, karena dengan sistem penyalahgunaan keuangan dapat diperkecil.

Redaksi

Opini dan Cerpen dapat dikirim melalui email pid@litbangkemendagri.com atau melalui whatsapp di 085813258250

MEDIA BPP

VOLUME 5 NO 1 | JANUARI - FEBRUARI 2020

DAERAH 36

LOMBOK TETAP JADI PRIMADONA

Bencana gempa yang sempat mengguncang Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada 2018 lalu, tak mampu memudarkan magnet kunjungan ke daerah tersebut. Daerah itu terus bangkit dan berbenah diri. Kekayaan alam dan budaya menjadikan Lombok sebagai wisata primadona.



BPP DAERAH 34

TETAP FOKUS MENGEMBANGKAN KOMODITAS LOKAL

LEBIH DEKAT 40

MENEGAKKAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Tugas dosen bukan hanya mengajar, melainkan meneliti, dan mengabdikan kepada masyarakat. Tiga hal yang sering disebut tri dharma perguruan tinggi ini saling terkait. Kesadaran ini dipahami betul oleh **RIYANARTO SARNO** (60). Dosen Institut Teknologi Sepuluh Nopember itu, terus bergeliat meningkatkan penelitiannya. Tak hanya berhenti pada publikasi ilmiah, penelitiannya juga berakhir menjadi sebuah produk bernilai guna.

JENDELA BPP 1-10

AKTIVITAS 11

KILAS BERITA 41

GAYA HIDUP 42

SAINS DAN TEKNOLOGI 44

RESENSI BUKU 45

RESENSI FILM 48

SASTRA 50

KOMIK 53

OPINI PENATAAN JABATAN FUNGSIONAL DI BPP KEMENDAGRI 54

MEMBENDUNG RESISTENSI PENYEDERHANAAN BIROKRASI 56

CATATAN 58

INFOGRAFIS 59

LAPORAN UTAMA 16-33

KAJI DAHULU, UBAH STRUKTUR KEMUDIAN

MENGAWALI MASA PERIODE KEDUA PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO, KEMENTERIAN DALAM NEGERI DISIBUKKAN DENGAN WACANA PERAMPINGAN JABATAN STRUKTURAL. KAJIAN MENDALAM DIBUTUHKAN, AGAR LANGKAH PERAMPINGAN TAK SALAH ARAH.



Copy Sianida yang Menghidupkan

Layanan pemerintahan dituntut untuk semakin beradaptasi dengan perkembangan zaman termasuk dalam penggunaan teknologi. Respons itu, sejumlah daerah membuat layanan berbasis teknologi untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Namun, tak semua daerah mampu menciptakannya, terlebih ongkosnya tidak murah.

Sebagai instansi yang berperan mendorong inovasi di daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri), melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Inovasi Daerah, terus berupaya meningkatkan daerah berinovasi. Kali ini, Puslitbang Inovasi Daerah tengah membangun aplikasi yang memudahkan daerah mereplikasi inovasi. Aplikasi itu disebut Copy Sianida (Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah). Seperti namanya, Copy Sianida diarahkan mampu melipatgandakan inovasi dari satu daerah ke daerah lain. Berbeda dengan Copy Sianida yang sempat menghebohkan publik, sistem ini justru membangun percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

Sistem ini berfungsi menghimpun berbagai inovasi yang telah dihasilkan oleh daerah dalam satu wadah. Kepala Puslitbang Inovasi Daerah, Matheos Tan, menuturkan dalam penjurangan itu tidak semua inovasi diambil. Puslitbang Inovasi Daerah hanya menghimpun inovasi yang andal untuk kemudian dapat direplikasi ke seluruh daerah di Indonesia. “Kita ini pusat jejaring inovasi, kami menjangkau inovasi yang ada tetapi melihat mana yang bagus, dengan ATM (amati tiru dan modifikasi) untuk dijadikan replikasi,” tutur Matheos saat ditemui belum lama ini.

Replikasi merupakan cara alternatif untuk menanggulangi ongkos pembuatan aplikasi yang mahal. Dengan mereplikasi, daerah dapat mengalihkan anggarannya untuk urusan lain. “Jadi kabupaten itu misalnya ingin membuat aplikasi seharga 100 juta, dia tidak perlu lagi, kami akan fasilitasi dan berikan melalui kabupaten atau provinsi yang sudah punya, jadi di sana ia hidup karena uang itu bisa digunakan untuk kegiatan lain,” tuturnya.

Sebelumnya, Puslitbang Inovasi Daerah telah mengembangkan berbagai kanal untuk menjangkau inovasi yang ada di daerah. Kanal-kanal inilah yang nantinya menjadi input



■ Kepala Puslitbang Inovasi Daerah Matheos Tan memberikan materi terkait inovasi di hadapan para pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

aplikasi Copy Sianida. Di antara kanal yang dikembangkan itu yakni *Tutorial Exhibition of Innovation (Tuxedovation)*, Pusat Jejaring Inovasi Daerah (Puja Indah), dan Indeks Inovasi Daerah.

Tuxedovation merupakan layanan berisi kumpulan video inovasi daerah. Video itu berasal dari unggahan daerah saat memasukkan instrumen penilaian Indeks Inovasi Daerah. Indeks ini adalah himpunan inovasi yang dilaporkan daerah kepada Menteri Dalam Negeri, sebagai bentuk pembaruan

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dari tayangan itulah kemudian antardaerah dapat melihat bagaimana inovasi yang telah dikembangkan di sejumlah daerah. Sedangkan Puja Indah berisi kumpulan beragam aplikasi layanan pemerintahan yang meliputi perizinan, kesehatan, pendidikan, komoditas, ketenagakerjaan, memperbarui kependudukan dan aspirasi DPRD.

Matheos menjelaskan, Puslitbang Inovasi Daerah dapat memfasilitasi daerah yang tertarik untuk mereplikasi inovasi. Ia mencontohkan secara garis besar proses replikasi yang dilakukan. Ketika daerah hendak mereplikasi misalnya

layanan retribusi berbasis elektronik (e-Retribusi) di Kabupaten Banyuwangi. Puslitbang Inovasi Daerah terlebih dulu menyurati pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Usai mendapat respons, daerah yang bersangkutan dapat mengikuti pelatihan sekaligus simulasi layanan e-retribusi dengan Kabupaten Banyuwangi. “Tetapi biaya disediakan Pemda itu, Kabupaten Banyuwangi cuma menyediakan aplikasinya untuk direplikasi,” katanya.

Sebelum melakukan simulasi, terlebih dulu diawali dengan penandatanganan perjanjian komitmen antara daerah yang mereplikasi dengan mengetahui BPP Kemendagri. Selain itu, daerah yang telah memberikan pelatihan sekaligus aplikasinya untuk direplikasi, juga akan diberi sertifikat sebagai bukti untuk diunggah pada instrumen Indeks Inovasi Daerah.

Guna mengapresiasi daerah yang giat mengembangkan inovasi, setiap tahunnya Puslitbang Inovasi Daerah menggelar *Innovative Government Awards (IGA)*. Pada ajang ini daerah akan dinilai berdasarkan angka Indeks Inovasi Daerah yang terhimpun dalam sistem. Dari sistem ini akan diketahui hasil skor tertinggi, yang kemudian dinilai secara lebih lanjut oleh tim penilai dari kementerian dan lembaga terkait. Setelah itu, didapati daftar peraih IGA yang terdiri dari 5 besar provinsi terinovatif, 10 kabupaten terinovatif, 10 kota terinovatif, 3 daerah perbatasan terinovatif, dan 3 daerah tertinggal terinovatif.

Para peraih IGA itu akan ditetapkan melalui keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Penghargaan juga diberikan langsung oleh Mendagri. Selain itu, peraih penghargaan itu nantinya bakal diajukan ke Kementerian Keuangan untuk mendapatkan dana insentif daerah (DID). Pemberian DID, kata Matheos, untuk memotivasi daerah agar lebih giat dalam membina dan melaksanakan inovasi di daerah masing-masing. Ia menekankan, dalam meningkatkannya inovasi komitmen kepala daerah dibutuhkan. “Inovasi tanpa komitmen pimpinan bagaikan tong kosong nyaring bunyinya,” pungkas Matheos.

■ MUJAJENI

Kaji Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat

Selain sebagai kepala daerah, gubernur juga berperan menjadi wakil pemerintah pusat. Peran itu diatur dalam Pasal 91, 92, dan 93 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lebih lanjut, tugas ini pun diatur melalui Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Tugas dan wewenang itu misalnya, (1) mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan di daerah (2) melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi, serta sejumlah tugas lainnya.

Namun sayangnya, menurut Kepala Bidang Administrasi Kewilayahan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kewilayahan dan Pemerintahan Desa (Puslitbang Adwil Pemdes), Agung Wijaya, saat ini peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dinilai masih kurang. Kondisi ini ditandai dengan tidak sedikitnya wakil pemerintahan kabupaten/kota yang langsung berkoordinasi ke pemerintah pusat saat menemui persoalan. Padahal, persoalan itu mestinya dapat dikoordinasikan terlebih dulu dengan gubernur setempat.

Agung menuturkan, sejak berlakunya otonomi daerah, koordinasi dilakukan secara berjenjang dari kabupaten/kota ke provinsi. Kemudian pemerintah provinsi yang melanjutkan koordinasi ke pemerintah pusat. “Jangan sering-sering ke pusatlah, dia (kabupaten/kota) cukup koordinasi ke provinsi, yang koordinasi ke pusat adalah provinsi,” tutur Agung, saat ditemui di



ruangannya, Jumat (30/1).

Dengan adanya otonomi daerah, lanjut Agung, juga bertujuan mendekatkan pemerintah kepada masyarakat. Ia menyebutkan, saat daerah memiliki masalah, sementara bupati/walikota-nya sering melakukan perjalanan dinas ke pemerintah pusat, maka penyelesaiannya menjadi lamban. “Cukup yang dekat-dekat saja, mencari solusi dan segala macamnya, kalau pengambil keputusannya sering ada di Jakarta, seperti apa daerah itu,” terang Agung.

Selain itu, Agung khawatir, akibat seringnya pemerintah kabupaten/kota berkoordinasi ke pemerintah pusat, akan berdampak pada penggunaan anggaran daerah. Dengan berkoordinasi ke pemerintah provinsi, anggaran itu dapat ditekan dan dialokasikan ke sektor lainnya yang lebih memajukan masyarakat. Di sisi lain, dalam menjalankan perannya sebagai wakil pemerintah pusat, gubernur telah mendapat alokasi khusus dari APBN.

Saat anggaran itu tidak terserap, maka akan dikembalikan kepada negara. Sedangkan bagi gubernur yang kurang berperan, dapat dikatakan belum maksimal mengontrol daerahnya. “Buat apa dia diberi kekuasaan di UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagai wakil pemerintah pusat, di UU itu sudah jelas,” tuturnya. Dengan perkembangan teknologi, mestinya gubernur lebih mudah menjalankan perannya tersebut.

Melihat dari berbagai persoalan itu, Agung mengatakan, Bidang Administrasi dan Kewilayahan bakal mengkaji persoalan tersebut. Terlebih hal ini juga menjadi isu yang mengemuka, saat Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri) menggelar Majelis Pertimbangan bersama komponen Kemendagri. Forum itu sebagai wadah menghimpun masukan perihal isu apa saja yang dianggap krusial untuk dikaji. Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri juga mengarahkan pentingnya mem-

perkuat peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Hal itu termuat dalam program prioritas pembangunan 2020-2024 di lingkungan Kemendagri pada poin penyederhanaan regulasi khususnya UU No 23 Tahun 2014.

Saat berita ini ditulis, Puslitbang Adwil, Pemdes, dan Kependudukan termasuk Agung sudah melakukan pembacaan awal bersama para peneliti, ihwal persoalan yang menyandung

jalannya peran gubernur tersebut. Sejumlah persoalan yang baru didata itu, misalnya terkait perangkat sumber daya manusia, dan juga sistematika penganggarannya. Selain aspek itu, Agung masih terbuka terhadap masukan aspek lain dari komponen terkait, dengan catatan anggaran yang dikanalangi memadai.

Sebelum dilakukan kajian mendalam, Agung berencana mengawalinya

dengan studi pendahuluan. Langkah itu untuk mengidentifikasi persoalan apa saja yang menjadi penghambat dan membutuhkan kajian lebih jauh, sekaligus memverifikasi kebenaran data dari hasil pembacaan awal. Jangan sampai, kata Agung, instrumen yang sudah disusun justru berbenturan dengan kenyataan di lapangan. “Sebenarnya kita sudah tahu, tetapi *kan* lebih pasnya di mana (masalahnya),” pungkask Agung. ■ MUJAENI

Meramu Langkah Penurunan Emisi GRK Layanan PJU

Kabupaten Sidoarjo berpotensi mampu mengelola penerangan jalan umum (PJU) dengan memanfaatkan energi yang efisien. Dengan potensi ini, kabupaten tersebut dapat menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) yang selama ini ditimbulkan. Namun, hal itu bisa terwujud jika adanya pembenahan di sejumlah aspek, seperti melakukan restrukturisasi teknis pengelolaan PJU dan meningkatkan APBD melalui kerja sama di bidang pelayanan energi dengan sejumlah pihak. Kondisi ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain untuk membenahi pengelolaan PJU secara berkualitas, terutama dalam mendukung penurunan emisi GRK.

Kemungkinan adanya potensi itu muncul, setelah Pusat Penelitian dan Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Puslitbang Pembangunan dan Keuangan Daerah), Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri), mengkaji potensi dan dampak penerapan efisiensi energi dalam pengelolaan PJU untuk penurunan GRK belum lama ini. Kajian tersebut dilakukan di Kabupaten Sidoarjo.

Dalam kajian ini, Puslitbang Pembangunan dan Keuangan Daerah, melihat beberapa dimensi kebijakan dari yang berkaitan dengan hal teknis sampai sistem penganggaran. Selain itu, untuk melihat sejumlah kebijakan yang menentukan kontribusi penerapan

energi yang efisien dalam pengelolaan PJU, maka dilihat beberapa aspek, seperti produktivitas, linieritas, substansi kebijakan, perilaku *stake holders*, partisipasi kelompok sasaran, dan aspek sumber daya manusia.

Selama ini pengelolaan PJU di sejumlah daerah dinilai belum dilakukan secara efektif, seperti masih menggunakan pola konvensional dan belum memanfaatkan teknologi yang efisien. Di sisi lain, penempatan PJU juga belum tertata secara baik. Hal itu ditandai dengan beberapa titik yang dinilai penting difasilitasi, justru belum terpasang PJU. Pengelolaannya juga masih memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga perlu adanya terobosan kebijakan.

Kepala Bidang Urusan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, Fredrick Simatupang, menuturkan untuk menurunkan emisi GRK di daerah, pemerintah pusat telah menetapkan berbagai regulasi, terutama dalam mendukung penerapan energi yang efisien dalam pengelolaan PJU. Misalnya Kementerian Perhubungan melalui Peraturan Menteri Perhubungan No PM 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menginisiasi pembentukan PP No 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi, selain itu terdapat pula sejumlah regulasi lainnya yang terkait.



■ Kepala Bidang Urusan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, Fredrick Simatupang, mengisi acara di Orchard Hotel Jayakarta beberapa waktu lalu

Namun tidak dipungkiri, saat ini terutama di Kabupaten Sidoarjo masih ditemukan beberapa persoalan dalam pengelolaan PJU. Menurut kajian yang dilakukan, persoalan itu di antaranya, (1) Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) terkait konservasi energi PJU masih kurang akseleratif, (2) kebijakan pengelolaan PJU masih belum berkembang mengikuti perkembangan zaman, (3) koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah yang belum optimal, (4) kapasitas kelembagaan pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang terbatas.

Dengan persoalan itu, lanjut Fredrick, BPP Kemendagri merekomendasikan beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pihak terkait. Misalnya di tingkat pemerintah pusat, masih perlu adanya penguatan koordinasi, antara Kemendagri, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ESDM, dan Kementerian Perhubungan.

Di samping itu, sebagai pembina dari pemerintah daerah,

Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah perlu melakukan beberapa hal. Di antara langkah itu misalnya menajamkan kualitas hasil rapat koordinasi teknis dengan kementerian dan lembaga teknis dalam menyelaraskan urusan di bidang perhubungan. Selain itu, perlu juga melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah untuk memfasilitasi akselerasi kebijakan KPDBU ihwal konservasi energi dalam pengelolaan PJU.

Sementara itu, untuk Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat diharapkan dapat menunaikan sejumlah langkah kebijakan. Langkah itu di antaranya adalah memutakhirkan regulasi daerah dengan menyesuaikan konsideran mengacu pada peraturan regulasi pusat perihal pengelolaan PJU, konservasi energi, dan penurunan emisi GRK. Selain itu, perlu pula melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dalam upaya konservasi energi dan penurunan emisi GRK. "Serta menjalin kerja sama dengan badan usaha dalam pengelolaan PJU dengan tetap mempertimbangkan aspek kinerja dan memerhatikan kesehatan lingkungan serta pembangunan berkelanjutan," tutur Fredrick.

■ MUJAENI

Sekjen Kemendagri Pimpin Sertijab Kepala BPP

JAKARTA- Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Hadi Prabowo, memimpin serah terima jabatan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri, dari Dodi Riyadmadji kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Agus Fatoni, di Aula BPP Kemendagri, Rabu (12/2).

Fatoni ditunjuk Menteri Dalam Negeri untuk menjadi Pelaksana Tugas Kepala BPP Kemendagri. Serah terima jabatan itu dilakukan, usai dilantikannya Dodi sebagai pejabat fungsional Widyaiswara ahli utama belum lama ini. Pelantikan itu dilakukan berdasarkan keputusan Presiden.

Dalam sambutannya, Hadi mengucapkan terima kasih kepada Dodi yang telah membuat kemajuan di BPP kemendagri. Berbagai kerja yang dilaksanakan pada masa kepemimpinan Dodi, hendaknya menjadi acuan untuk arah kerja mendatang. Dirinya berharap, di bawah Fatoni BPP dapat menjadi lebih baik lagi. BPP kata Hadi, memiliki peran strategis dalam mendukung kerja-kerja Kemendagri. "Sebagai Badan Penelitian dan Pengembangan, ke depan semakin mantap dalam melaksanakan tugasnya," tutur Hadi.

Hadi menyingung sejumlah hal yang perlu dicermati oleh BPP Kemendagri. Misalnya terkait arahan Menteri Dalam Negeri yang menginginkan adanya kajian ihwal pemilihan kepala daerah yang selama ini dilakukan secara serentak. Kegiatan itu, katanya, dapat dilakukan dengan menggandeng sejumlah pihak, baik perguruan tinggi maupun lembaga riset lainnya. Dalam melakukan kajian, Hadi mengimbau agar BPP Kemendagri selalu berkoordinasi dengan para komponen sehingga dapat mendukung kemajuan Kemendagri.



■ Dihadapan Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo, Dodi Riyadmadji menandatangani dokumen serah terima jabatan Kepala BPP Kemendagri. Dengan begitu Kepala BPP Kemendagri resmi dijabat oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Agus Fatoni sebagai Plt.

Selain itu, seiring berkembangnya dinamika, peran Kemendagri sebagai pembina sekaligus pengawas jalannya pemerintahan daerah telah mengalami perubahan yang signifikan. Saat ini, kata Hadi, kementerian yang berurusan dengan pemerintah daerah tidak segan mendatangi langsung tanpa melibatkan Kemendagri. Dengan realitas seperti itu, sudah semestinya Kemendagri merumuskan langkah tepat yang perlu diambil.

Di sisi lain, isu inovasi juga perlu menjadi perhatian BPP Kemendagri. Hadi berharap, BPP Kemendagri dapat menghasilkan inovasi yang mampu diterapkan di lingkup Kemendagri bahkan pemerintahan daerah. Sehingga perannya tak hanya memberikan penghargaan terhadap inovasi yang dilakukan pemerintah daerah. "Tentunya BPP juga melakukan evaluasi dan monitoring terhadap inovasi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, kabupaten, kota," tuturnya.

■ MUJAENI

Tantangan di Awal Tahun; Perampingan Birokrasi hingga Isu BPP Daerah

JAKARTA - Memasuki masa pemerintahan periode kedua, Presiden Joko Widodo menggagas penyederhanaan reformasi birokrasi dengan wacana penghapusan level jabatan eselonisasi yang dinilai terlalu banyak. Beberapa waktu lalu, banyak K/L sudah melakukan pengkajian terhadap penataan birokrasi di lingkungannya masing-masing, tidak terkecuali Kementerian Dalam Negeri.

Sebagai lembaga pengkajian di Kementerian Dalam Negeri, Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kemendagri juga tidak lepas dari isu yang diwacanakan tersebut. Terlebih, Badan Litbang Kemendagri memiliki tugas ganda. Selain memberikan rekomendasi terkait perampingan struktur organisasi di Kemendagri, juga harus mengkaji struktur organisasi yang pas berada di Badan Litbang itu sendiri.

Wacana penataan ulang strukturisasi tersebut, mengawal diskusi Badan Litbang Kemendagri di 2020 yang dilaksanakan di Ruang Rapat Badan Litbang Kemendagri, Senin (6/1). Diskusi semakin menarik, pasalnya berbicara lembaga kelitbang di K/L tidak lepas dari wacana penggabungan Badan Litbang ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta isu terkait UU No 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Tidak perlu khawatir

Tidak hanya itu, kehadiran UU tersebut juga oleh sebagian pihak dikhawatirkan akan menggerus tupoksi Badan Litbang Kemendagri dalam memfasilitasi Badan Litbang Daerah, meskipun hanya satu daerah yang sudah membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRID) yaitu provinsi Bali.

Namun Kurniasih Kepala Pusat Litbang Adwil, Pemdes, dan Kependudukan tidak khawatir dengan adanya UU Sisnas Iptek tersebut. Menurutnya UU Sisnas Iptek tidak mematahkan regulasi sebelumnya. Justru UU tersebut bisa dikawinkan dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang berbicara tupoksi kelitbang.

“Ini menjadi tugas kita, untuk mencari celah sebagai penguat. Jika kita lihat juga, di mana pun lembaga kelitbang menjadi yang paling penting. Tidak ada kebijakan yang keluar kecuali berdasarkan hasil riset dalam semua organisasi termasuk perusahaan swasta. Kita juga bisa seperti itu, tinggal bagaimana *mindset* kita diubah dan bisa memberi masukan yang meyakinkan pimpinan,” ucapnya.

Kurniasih juga meyakini Badan Litbang Kemendagri akan memiliki *trigger*, karena memiliki pusat inovasi. Menurutnya itu menjadi salah satu ruang kepercayaan dalam menilai



■ Plt. Sekretaris BPP Kemendagri Horas Maurits Panjaitan memimpin rapat terbatas terkait penyederhanaan birokrasi Januari 2020 lalu di BPP Kemendagri

daerah inovatif. Fasilitasi kepada daerah juga akan semakin baik, terlebih jika Badan Litbang selama ini tidak melulu berada di zona nyaman.

“Sekarang ada UU No 23 Tahun 2014 dan UU No 11 Tahun 2011. Kita punya kekuatan. Dengan demikian kita lebih punya gigi. Harus ada perubahan signifikan dan keberanian kita mengubah baju. Harus ada suatu keberanian untuk menyesuaikan dengan perubahan zaman. Sehingga pembinaan menjadi jelas. Kalau kita tidak menyesuaikan saya khawatir dilebur,” kata Kurniasih.

Matheos Tan Kepala Puslitbang Inovasi Daerah juga menyarankan, nomenklatur Badan Litbang Kemendagri diubah menjadi Badan Litbang dan Inovasi. Dengan begitu *heavy* dari lembaga kelitbang bukan lagi penelitian dan pengembangan namun lebih kepada inovasi. Sehingga di masa mendatang, Badan Litbang tidak melulu bekerja di belakang kursi, namun terjun ke lapangan. Ia juga menyarankan adanya pusat khusus yang menangani kegiatan penelitian, sehingga dana penelitian yang ada di setiap puslitbang selama ini bisa terkonsentrasi.

Nomenklatur penamaan

Theo juga mengatakan perkembangan Badan Litbang daerah yang sudah jauh berbeda dengan Litbang Kemendagri. Di

provinsi Bali, misalnya, menurut Theo kegiatan penelitian tidak lagi dilakukan hanya meneliti kebijakan pemerintah, namun dengan cakupan yang luas. Beberapa penelitian ada yang dilakukan selama satu tahun dengan melibatkan banyak pihak, sehingga mereka perlu memiliki BRID.

“Ini Cuma masalah nomenklatur. Jangkauan kerja luas dan memberi kemudahan untuk mendapatkan pendanaan dari pusat. Penamaan itu juga yang membuat mereka terbuka,” terang Theo.

Pelaksana Tugas Sekretaris BPP Kemendagri Horas Maurits Panjaitan mengatakan, menurutnya tidak ada masalah dengan penamaan Badan Litbang dalam UU No 11 Tahun 2019, namun yang akan berubah justru struktur organisasi yang sudah disarankan Presiden. Maurits juga berpendapat pembentukan BRID harus didasarkan pada regulasi. Karena di dalam Permendagri No 5 Tahun 2017 masih mengatakan Badan Litbang Daerah.

Terkait struktur organisasi yang ada, Maurits juga menyarankan agar sejarah dan filosofi pembentukan Badan Litbang Kemendagri bisa ditinjau kembali. “Kita jangan lupa juga kalau Badan Litbang yang dibentuk di sini, diharapkan bisa memberikan rumusan-rumusan kebijakan terhadap 12 komponen yang ada di Kemendagri, di samping kita juga membina litbang daerah,” sarannya.

Senada dengan Maurits, dan beberapa Kepala Pusat Litbang, Mohammad Noval Kepala Bagian Perencanaan BPP Kemendagri mengatakan pembahasan yang harus didahulukan

mengenai stuktur birokrasi adalah terkait internal di Badan Litbang itu sendiri. Terutama sejauh ini pihaknya belum memiliki informasi tentang wacana pembahasan pokok-pokok pikiran Biro Organisasi Kemendagri. Di sisi lain, menurutnya sejauh ini belum ada dukungan kuat dan pokok pikiran yang jelas mengenai SOTK di Kemendagri.

Untuk itu, yang paling rasional yang bisa dilakukan dalam waktu dekat menurut Noval adalah memberikan rekomendasi kepada Menteri Dalam Negeri mengenai struktur organisasi Kemendagri itu sendiri dalam konteks perampingan, kemudian struktur organisasi Badan Litbang Kemendagri, dan Badan Litbang Daerah.

Fokus tupoksi internal

Noval menambahkan, cara yang paling sederhana adalah dengan menggali pengalaman empiris tugas fungsi Kemendagri selama ini yang justru tumpang tindih dengan beberapa K/L. “Kalau kembali kepada peran Badan Litbang di sini, selain mengkaji kondisi kita ke depan, kita juga harus memberi kontribusi arah penyempurnaan Kemendagri ke depan. Dan ke bawah, kita memfasilitasi Badan Litbang Daerah,” tambahnya.

Terkait dengan penamaan, menurut Noval, daerah sudah sangat dinamis, menyikapi UU No 11 Tahun 2019. Ia tidak menampik, adanya beberapa Badan Litbang daerah yang ingin melakukan pengubahan nomenklatur nama. Menurutnya tidak masalah, tetapi hal tersebut harus benar-benar konsisten. Kita harus memberi masukan kepada Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri agar konsisten. Jika misalnya, penamaan diizinkan dan tidak sesuai dengan Permendagri, maka Badan Litbang harus bergerak cepat mengubah regulasi yang ada.

“Secara normatifnya seperti itu, nomenklaturnya Balitbang-da di Permendagri No 5. Kita harus bergerak apakah mau membuat pola seragam, atau sesuai keinginan daerah berdasarkan tingkat kemapanan mereka. Terus terang mereka di daerah ingin tetap bertahan dengan aturan di Permendagri,” ujar Noval.

Agar sesegera mungkin menemukan titik temu, menurut Noval forum diskusi harus segera dibuat. Pelibatan pakar menjadi pilihan baik. Dalam forum diskusi tersebut nantinya bisa menemukan filosofi dan aturan dengan ekspektasi yang visioner, terkait visi misi Litbang Daerah dan Litbang Kemendagri, sebelum melangkah ke penamaan.

“Fungsi litbang daerah nantinya apakah selain pengkajian kebijakan mereka juga melakukan penelitian dasar. *Nah* ini coba kita gali juga. Atau kita akan membagi segmennya, disesuaikan dengan tingkat kemampuan daerah. Standar tupoksi mereka seperti apa, agar kita memiliki *legal standing* yang jelas bagi mereka,” terang Noval.

Susun Strategi, Atur Pengelolaan Keuangan Teruji

JAKARTA-Memasuki awal tahun penggunaan anggaran 2020, Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri, melalui Bagian Keuangan menyusun langkah-langkah strategis pengelolaan keuangan. Upaya itu dilakukan Bagian Keuangan melalui gelaran diskusi yang berlangsung di salah satu hotel di Jakarta, Selasa (11/2).

Hadir dalam kegiatan itu, sejumlah perangkat kerja internal BPP Kemendagri dan komponen terkait. Guna memberikan pengarahan ihwal langkah pengelolaan keuangan yang sesuai aturan, BPP Kemendagri juga mengundang sejumlah pembicara, seperti dari Kementerian Keuangan dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kepala Bagian Keuangan, Tihar Marpaung, menuturkan melalui kegiatan ini diharapkan dapat terbangun pemahaman yang benar, ihwal mekanisme

penggunaan anggaran sesuai aturan. Dengan begitu, langkah BPP Kemendagri dapat memenuhi capaian kinerja yang telah ditentukan, baik dalam pakta integritas maupun standar biaya masukan. “Dengan demikian, sasaran dalam *output* yang telah sesuai PK tersebut dapat dicapai sesuai jadwal yang telah disusun,” tutur Tihar. Dengan pengelolaan yang benar, lanjut Tihar, dapat memperkecil kemungkinan adanya temuan baik dari Badan Pengawas Keuangan maupun Inspektorat Jenderal Kemendagri.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Sekretaris BPP Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, menuturkan unit kerja BPP Kemendagri perlu menyusun langkah percepatan penggunaan anggaran 2020. Maurits sendiri menyebutkan sejumlah hal yang perlu ditempuh untuk mewujudkan percepatan tersebut. Beberapa di antaranya, misalnya mengarahkan unit kerja agar lekas melakukan *review* dan menyusun ren-



■ ATAS: Dalam acara pertemuan mengenai langkah strategis pengelolaan keuangan, Plt Sekretaris BPP Kemendagri memberi sambutan

■ BAWAH: Kepala Bagian Keuangan Tihar Marpaung, beserta para Kasubag Bagian Keuangan menjadi pemateri di hadapan para pegawai BPP Kemendagri Februari 2020 lalu.

cana pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2020. “Artinya semua agenda, jadwal-jadwal kegiatan juga harus disiapkan,” tutur Maurits.

Dalam menyusun itu, dirinya mengimbau agar unit kerja BPP Kemendagri menghindari adanya kemungkinan pelaksanaan kegiatan yang tumpang tindih. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, ia menegaskan, jangan sampai pelaksanaan kegiatan menumpuk pada akhir tahun anggaran.

Selain itu, Maurits juga meminta agar pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2020 dapat dikawal secara ketat dengan mengacu pada dokumen perencanaan, seperti rencana kerja maupun rencana strategis yang dimiliki BPP Kemendagri. Program prioritas, lanjutnya, mesti diutamakan pelaksanaannya agar lekas tercapai. Penggunaan anggaran harus dilakukan dengan tertib, yakni mengacu pada berbagai aturan yang berlaku. Penggunaannya juga harus menekankan pada sikap transparan dan akuntabilitas.

Ia menekankan, efektivitas penggunaan anggaran tidak hanya mengacu pada seberapa banyak anggaran yang terserap. Tetapi, perlu juga melihat ha-

sil dari kegiatan yang berkualitas dengan tercapainya target kinerja. Untuk memantau perkembangan itu, Maurits mengaku bakal ada pertemuan di periode tertentu dengan Sekretaris Jenderal Kemendagri, yang nantinya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

Guna mencapai sejumlah kinerja, Maurits mengimbau agar para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk meningkatkan pengawasan. Hal itu untuk menghindari adanya temuan, terlebih yang sudah terjadi di tahun anggaran sebelumnya. Tidak hanya pada Bagian Keuangan, masing-masing Pusat Penelitian dan Pengembangan agar memverifikasi secara ketat



■ Pemateri memberikan penjelasan mengenai pengelolaan strategis keuangan di pemerintahan.

penggunaan anggaran. Hal itu juga penting dilakukan untuk membangun efektivitas pengendalian keuangan. “PPK harus bertanggung jawab penuh setiap proses pelaksanaan anggaran dan posisi PPTK itu harus kita perankan,” tuturnya. PPTK, lanjutnya, perlu dilibatkan karena memahami dan bertanggung jawab secara teknis ihwal pelaksanaan kegiatan.

Sementara itu, untuk membangun pemahaman pengelolaan keuangan yang benar, pada diskusi itu, Bagian Keuangan memetakan sejumlah materi pembahasan yang disampaikan oleh pembicara. Beberapa di antaranya, seperti, (1) Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian/Lembaga, (2) Upaya membangun persamaan persepsi dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku, (3) Evaluasi dan *review* pelaksanaan anggaran BPP Kemendagri tahun anggaran 2019, serta pelaksanaan kartu kredit pemerintah sesuai dengan PMK No 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, (4) Sistem penganggaran berdasarkan PMK No 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020.

■ MUJAENI

KAJI DAHULU, UBAH STRUKTUR KEMUDIAN

MENGAWALI MASA PERIODE KEDUA PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO, KEMENTERIAN DALAM NEGERI DISIBUKKAN DENGAN WACANA PERAMPINGAN JABATAN STRUKTURAL. KAJIAN MENDALAM DIBUTUHKAN, AGAR LANGKAH PERAMPINGAN TAK SALAH ARAH.



Pada periode kedua, Presiden Joko Widodo menginginkan struktur birokrasi pemerintahan yang lebih ramping. Langkah itu diambil agar pelayanan kepada masyarakat lebih efektif dan efisien, terutama dalam menunjang investasi yang saat ini dinilai lesu akibat proses perizinan yang tak cepat. Dengan struktur yang ramping, diyakini mampu melipat proses pengambilan kebijakan, sehingga agenda pembangunan lekas terwujud. Guna merampingkan struktur itu, Presiden mengarahkan agar level di tiap lembaga pemerintahan disederhanakan, dari semula empat level menjadi dua level menyisakan eselon I dan II. Sementara

untuk eselon III dan IV bakal dialihkan menjadi pejabat fungsional yang lebih menghargai keahlian dan kompetensi. Wacana penghapusan eselon itu disampaikan Presiden saat Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat di kompleks parlemen, Minggu (20/10/2019).

Keinginan Presiden itu juga disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Tjahjo Kumolo. Seperti dilansir dari *cnnindonesia.com*, ia menuturkan, Presiden menginginkan perampingan itu segera berjalan. Perampingan ini tidak akan mengubah besaran penghasilan pega-

wai, tetapi lebih ke arah tugas. Untuk mewujudkan rencana itu, Menpan-RB akan berkoordinasi dengan lembaga terkait, seperti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman Republik Indonesia.

Dengan isu yang mengemuka tersebut, kementerian—termasuk Kemendagri—dan lembaga disibukkan dengan agenda penyederhanaan struktur birokrasi. Seperti yang dilakukan Kemendagri misalnya, yang membentuk tim khusus mengurus agenda tersebut. Tim itu mengemban dua tugas, yakni

menyederhanakan organisasi di lingkup internal Kemendagri dan di tingkat pemerintah daerah. Untuk internal Kemendagri, peran itu lebih banyak diemban Sekretariat Jenderal Kemendagri. Sedangkan perampingan di tingkat pemerintahan daerah, tugas itu banyak melibatkan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Sebagai pembina sekaligus pengawas bagi jalannya pemerintahan daerah, peran itu menjadi konsen Kemendagri.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Teguh Setyabudi, menuturkan Kemendagri terus memastikan agar langkah penyederhanaan itu sesuai dengan keinginan

Presiden. Keinginan yang dimaksud Teguh, yakni memudahkan pelayanan publik, perizinan, serta meningkatkan investasi. Tiga aspek itu merupakan hal penting dalam menunjang kemajuan bangsa, seperti membuka lapangan kerja sehingga terciptanya kesejahteraan. “Jangan sampai apa yang kita lakukan jadi anti klimaks, artinya *enggak* sesuai (tujuan),” tutur Teguh, yang juga Ketua Pengarah Tim Penyederhanaan Kemendagri, saat ditemui di kantonya, Kamis (30/1).

Ia mengatakan, untuk penyederhanaan di internal Kemendagri, timnya sudah berkomunikasi dengan para pimpinan komponen. Masing-masing komponen

diberikan kesempatan untuk mencermati bagaimana penyederhanaan dapat dilakukan. Menurutnya, tidak semua jabatan struktural di komponen cocok dialihkan menjadi fungsional, sehingga membutuhkan kecermatan. “Tidak bisa langsung seketika, untuk Direktorat Jenderal tertentu apakah betul menjadi fungsional akan lebih efektif, belum tentu *lho*,” tutur Teguh. Sedangkan untuk penyederhanaan struktur organisasi di tingkat pemerintah daerah, Kemendagri juga sudah memberikan pengarah langkah-langkah strategis yang perlu ditempuh.

Penyisiran itu kemudian menghasilkan usulan posisi jabatan mana saja

yang dapat dialihkan menjadi fungsional. Selain itu, dalam usulan itu juga mencantumkan pilihan jenis jabatan fungsional, yang dinilai dapat menggantikan peran jabatan struktural yang bakal dialihkan. “Akhirnya ketemu untuk Kemendagri, oh ada sekian jabatan eselon III yang bisa ditransformasi ke jabatan fungsional tertentu,” jelasnya. Begitu pula dengan pendataan jabatan eselon IV yang memungkinkan untuk dialihkan ke jabatan fungsional. Teguh meyakinkan, langkah perampingan itu tidak dilakukan secara instan, tetapi melalui proses kajian yang cermat.

Hasil penyisiran tersebut, lanjut Teguh, kemudian dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal Kemendagri, selaku pembina tim penyederhanaan. Jika sudah sesuai arahan, selanjutnya usulan itu diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Hasil itulah yang disampaikan Mendagri kepada Kemenpan-RB. Teguh menuturkan, setiap langkah penyederhanaan birokrasi di Kemendagri maupun pemerintah daerah tidak terlepas dari koordinasi dengan Kemenpan-RB. Saat berita ini ditulis, komunikasi itu terus dibangun untuk menemukan formulasi terbaik ihwal perampingan birokrasi. Sejumlah langkah yang telah disusun pun, kata Teguh, akan terus dicermati

secara lebih lanjut. Ia juga mengaku terus mengikuti perkembangan kebijakan tersebut.

Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan, Biro Organisasi Tatalaksana Sekretariat Jenderal Kemendagri, Ediy Rofik, menuturkan minggu pertama pada Januari 2020, Kemendagri telah mengusulkan versi minimalis penyederhanaan birokrasi di internal Kemendagri kepada Kemenpan-RB. Usulan itu berdasarkan masukan dari seluruh komponen Kemendagri yang mengalihkan 11 eselon III dan 44 eselon IV seluruh Kemendagri. Selain menyusun pemetaan minimalis, Kemendagri juga telah menyiapkan opsi pemetaan penyederhanaan maksimalis. Pemetaan maksimalis dimaksud untuk merespons hasil rapat koordinasi dengan Kemenpan-RB yang menegaskan penyederhanaan eselon III dan IV perlu dilakukan secara menyeluruh. Menurut bahan paparan Kepala Biro Organisasi Tatalaksana pada 21 Januari 2020, pemetaan itu mengalihkan 284 dari 340 eselon III. Sedangkan untuk eselon IV mengalihkan 675 dari jumlah 916 orang. Rofik menyadari, harus lebih aktif mengambil langkah, melihat sejumlah kementerian melakukan penyederhanaan dengan jumlah besar. “Kami tidak bisa menunggu,

kami pro aktif karena hampir semua kementerian menghapus sebagian besar (struktural),” tuturnya.

Selain itu, Kemendagri juga menyampaikan kepada Kemenpan-RB agar Presiden mengeluarkan Perpres terkait *omnibus law* perpindahan jabatan struktural ke fungsional. Hal itu diperlukan, karena menurut Peraturan Menpan-RB No 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, yang menyebutkan jabatan fungsional harus melaksanakan fungsi koordinator. “Satu sisi harus nyari angka kredit, satu sisi harus menjadi koordinator tugas eselon yang sudah tidak ada,” katanya.

Dengan demikian, ia berharap skema kerja jabatan fungsional yang menjadi koordinator serupa jabatan rektor di perguruan tinggi yang mendapat keringanan beban SKS (satuan kredit semester) yang diambil. Untuk mendapat angka kredit, rektor juga dapat mengonversikan jabatannya. Melalui skema yang serupa, jabatan fungsional yang berperan sebagai koordinator



■ Penandatanganan serah terima jabatan di Kementerian Dalam Negeri.

juga dapat berimbas pada sistematika perolehan angka kredit.

BPP Kemendagri

Ihwal penyederhanaan birokrasi, Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri sendiri telah menyusun usulan perubahan formasi di lingkup internal secara minimalis. Usulan itu tertuang dalam surat bernomor 061/5258/LITBANG, berisi posisi yang dipertahankan sekaligus yang dialihkan ke jabatan fungsional. Komposisi struktural yang dipertahankan adalah seluruh eselon III dan IV yang menduduki posisi di Sekretariat Badan. Langkah itu mempertimbangkan penguatan fungsi pendukung dan koordinasi serta tata operasional manajerial teknis.

Selain itu, jabatan eselon III dan IV di Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) yang dinilai tidak berkaitan dengan perizinan, investasi, dan

masing-masing satu bidang. Dengan demikian, usulan itu mengalihkan empat dari 16 eselon III, dan delapan dari 40 eselon IV yang dimiliki BPP Kemendagri menjadi fungsional. Selain itu, dalam dokumen usulan tersebut juga menyertakan perubahan nominal pendapatan yang bakal dikantongi dari jabatan yang terkena peralihan. Nominal itu secara umum tidak banyak mengalami perubahan yang signifikan, justru sebagian besar naik dengan angka yang beragam.

Namun dalam skema pemetaan maksimalis, jumlah peralihan itu jauh lebih banyak. Hal itu merujuk pada dokumen yang dikeluarkan pada paparan Biro Organisasi Tatalaksana Sekretariat Jenderal pada 21 Januari 2020. Di Sekretariat Badan misalnya, Kepala Bagian Perencanaan beralih menjadi fungsional perencana madya, sedangkan dua subbagian di bawahnya menjadi perencana muda, dan satu subbagian lagi menjadi analis kebijakan muda. Di Bagian Pembinaan Jabatan Fungsional, Kepegawaian dan Sisdur serta Evaluasi Kinerja ASN, hanya mengalihkan satu subbagian menjadi analis kebijakan muda. Di Bagian Pembinaan Jabatan Fungsional, Kepegawaian dan Sisdur serta Evaluasi Kinerja ASN, hanya mengalihkan satu subbagian menjadi analis kebijakan muda.

Sedangkan untuk empat Puslitbang, seluruh bidang beserta subbidang dialihkan menjadi jenis fungsional tertentu. Jenis fungsional yang tercantum adalah peneliti, kecuali Puslitbang Inovasi Daerah yang diarahkan menjadi fungsional perekayasa. Kendati begitu, subbagian tata usaha di masing-masing Puslitbang tetap dipertahankan. Dengan skema tersebut, jumlah eselon III yang beralih di BPP Kemendagri sebanyak 13 dari total 16 orang. Sedangkan untuk eselon IV sebanyak 29 dari 40 orang.

Sementara itu, terkait aspek tertentu yang menjadi konsen perampingan Kemendagri diamini **Kepala BPP Kemendagri, Dodi Riyadmadji**. Dodi menuturkan, keinginan Presiden ihwal perampingan eselon dimaknai Mendagri hanya dalam urusan tertentu. Senada dengan Teguh, Mendagri lanjut Dodi, menafsirkan arahan Presiden



■ Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Teguh Setyabudi, saat ditemui di Kantornya beberapa waktu lalu.



itu hanya ingin memudahkan proses perizinan, pelayanan, dan mendukung investasi agar berkembang. Dengan begitu, perampingan jabatan hanya berlaku pada posisi tertentu. Pemahaman itu kemudian diamini oleh Menpan-RB, sehingga tidak semua eselon III dan IV dihilangkan. “Maka tidak semua eselon III dan IV itu dihapus,” kata Dodi saat ditemui di ruangannya.

Kebijakan perampingan eselon perlu dilakukan secara hati-hati karena jumlahnya melimpah dan tersebar, baik di pemerintah pusat maupun daerah. Dodi membayangkan, apa jadinya jika kebijakan itu dilakukan dengan menghapus semua eselon III dan IV yang tersebar di banyak tempat terutama daerah. Ia mengatakan, di daerah sendiri level jabatan itu menempati sejumlah posisi penting. “Kalau eselon III dan IV itu dihabisin, camat eselon III sekretaris desa eselon IV saya kira, maka siapa yang akan bekerja di lingkungan pemerintah daerah untuk eselon III dan IV,” tutur Dodi.

Selain itu, perampingan juga perlu me-

merhatikan skema pengisian jabatan. Dodi mempertanyakan, proses pengisian jabatan setingkat eselon II saat jabatan struktural di bawahnya tidak ada. Kala posisi itu diberikan kepada seseorang yang belum pernah menjabat eselon III, maka dapat dikatakan jabatan itu diisi oleh orang yang kurang berpengalaman. Hal serupa juga berlaku saat jabatan Kepala Puslitbang BPP Kemendagri kosong dan membutuhkan peran pelaksana tugas. Sebab, dengan dialihkannya jabatan eselon III di bawahnya menjadi fungsional, maka ia sulit mengambil peran tersebut.

Sedangkan untuk internal komponen Kemendagri, pemangkasan juga tidak dilakukan secara sembarangan. Dodi menuturkan, tidak semua eselon III dan IV bertugas melayani masyarakat secara langsung, sehingga pemangkasan dilakukan dengan mempertimbangkan penempatannya. Ia mencontohkan, di BPP Kemendagri, terdapat bagian sekretariat yang terdiri dari Bagian Umum, Bagian Perencanaan, Bagian Kepegawaian, dan Bagian Keua-

■ Apel rutin para pegawai BPP Kemendagri berseragam Korpri, yang diikuti oleh pejabat struktural eselon III dan fungsional peneliti.

ngan yang memiliki jabatan eselon III dan IV. Jabatan itu juga tersebar di Pusat Litbang yang menduduki formasi kepala bidang dan kepala subbidang.

Dodi menilai, komposisi BPP Kemendagri saat ini lebih ke arah struktural ketimbang fungsional. Padahal organisasi serupa BPP lebih menekankan pada fungsional. Secara pribadi Dodi menawarkan komposisi organisasi BPP yang dinilainya ideal ketimbang kondisi sekarang. Tawaran itu yakni dengan mengalihkan seluruh jabatan bidang dan subbidang di Puslitbang ke fungsional. “Kalau saya memang menyodorkan untuk di pusat-pusat itu pindah ke fungsional yang struktural itu (eselon III dan IV),” tutur Dodi.

Sebelumnya, untuk memetakan langkah strategis dan konkret dalam penyederhanaan organisasi, Kemenpan-RB telah mengirimkan surat kepada se-

jumlah pihak, termasuk jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju. Beberapa hal dibahas dalam surat yang ditandatangani Menpan-RB, Tjahjo Kumolo tersebut. Salah satu aspek yang dibahas yakni mengenai jabatan struktural eselon III dan IV yang dikecualikan mengalami perpindahan. Pertama, pegawai yang bersangkutan memiliki tugas dan fungsi sebagai kepala satuan kerja dengan kewenangan dan tanggung jawab dalam penggunaan barang dan jasa. Kedua, memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan kewenangan legalisasi, pengesahan, persetujuan dokumen, atau kewenangan kewilayahan. Selain kedua itu, surat tersebut mengatur, bahwa kriteria lain juga dapat diakomodasi berdasarkan usulan internal kementerian kepada Menpan-RB.

Peran BPP

Dodi menambahkan, wacana penyederhanaan birokrasi akan terus bergulir, dan sedikit banyak bakal mengganggu kerja Presiden, terlebih muncul isu lain

seperti rencana pemindahan ibu kota, dan terbitnya UU sapu jagat atau yang disebut *omnibus law*. Sebagai instansi penghasil rekomendasi kebijakan, Dodi mengamini BPP perlu menyikapi wacana perampingan dengan membuat kajian ihwal struktur internal BPP yang lebih ideal. Hasil kajian itu selanjutnya dapat dijadikan bahan kebijakan komponen terkait, terutama dalam mengubah BPP. Namun dia belum bisa memastikan kapan kegiatan itu bakal dilakukan, mengingat wacana itu bergulir cepat, sedangkan pengerjaan kajian memerlukan rencana anggaran. “Kajian itu *kan* pakai diprogram dan seterusnya, tahun ini harus mengikuti cepatnya perintah itu,” tutur Dodi. Ia menambahkan, saat ini BPP sedang berusaha mencari sumber dana untuk mengongkosi kegiatan tersebut.

Perlunya kajian tersebut juga disampaikan **Kepala Bagian Perencanaan BPP Kemendagri, Mohammad Noval Labadjo**. Ia menyarankan, restrukturisasi yang bakal dilakukan Kemendagri, mesti berpijak dari hasil kajian yang komprehensif dengan menelisik tugas dan fungsi. Saat aspek itu sudah diketahui secara jelas, selanjutnya barulah dilakukan restrukturisasi sekaligus penyederhanaan birokrasi.

Upaya itu lebih efektif karena sudah memetakan bagian mana saja yang perlu dipangkas. Misalnya saat mengkaji BPP Kemendagri, dapat berangkat dari hal mendasar terkait tugas dan fungsi. Usai dilakukan kajian, barulah menyusun struktur organisasi entah mengubah nomenklatur maupun komposisi struktur di dalamnya.

Noval menyayangkan, Kemendagri agak telat merespons kebijakan pemangkasan. Jauh sebelum kebijakan itu muncul, mestinya Kemendagri sudah mengarahkan struktur organisasi dengan mengacu ke arah yang lebih bagus. Terlebih Kemendagri membina pemerintahan daerah. Upaya pembacaan itu perlu segera dipersiapkan. Ia mewanti-wanti jangan sampai langkah itu menunggu kebijakan turun lebih lanjut. “Harus kita petakan jangka panjangnya struktur Kemendagri akan seperti apa,” tutur Noval.

Noval mengaku sempat beberapa kali mengikuti rapat pembahasan penyederhanaan struktur birokrasi. Menurutnya, sejauh ini skema pemangkasan yang dibahas adalah menyederhanakan dari struktur yang sudah terbentuk (*existing*). Bahkan, masukan penyederhanaan di BPP Kemendagri dilakukan



■ Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Dodi Riyadmadji, memimpin rapat terkait rencana kerja Badan Litbang di Aula BPP Kemendagri

paling tidak menghilangkan satu struktur eselon III di tingkat Puslitbang. Namun, memangkas dari struktur yang sudah ada, katanya justru dinilai berat. Tidak menutup kemungkinan pemangkasan itu hanya berdasarkan selera bukan berbasis pada kajian akademik. “Kita *kan* jadi pusing kalau harus memilih dari yang ada, jadi masalahnya ini nanti lebih lari ke selera,” tutur Noval.

Terkait peran BPP dalam memberikan kajian ihwal wacana restrukturisasi, Noval menuturkan mestinya itu menjadi obrolan di tingkat Puslitbang. BPP Kemendagri dapat menyodorkan naskah akademis perihal arah struktur Kemendagri. Dengan upaya itu dapat membantu penyusunan seluruh eselon I. “Fungsi BPP tadi untuk membantu melakukan kajian, sebenarnya Kemendagri ini pasnya seperti apa *sih*? Potret tugas fungsi kemudian kita arahkan struktur lembaganya seperti apa,” lanjutnya.

Namun dirinya mengakui, dengan komposisi Puslitbang saat ini secara tugas sudah habis membantu komponen Kemendagri khususnya Direktorat Jenderal. Saat ini peran BPP dalam membantu Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, pun BPSDM masih sedikit. Pangkalnya, tugas dan fungsi semacam itu tidak melekat pada masing-masing Puslitbang. Hal ini menjadi kekurangan BPP Kemendagri dalam mendukung kebutuhan internal Kemendagri.

Noval menyebutkan, tidak adanya tugas dan fungsi itu menjadi persoalan yang perlu diatasi. Meski demikian, mestinya BPP tetap bisa melakukan kajian. Namun, karena tidak melekat, membuat Puslitbang tidak merasa berkewajiban untuk turut terlibat. Padahal dukungan ke dalam internal Kemendagri dibutuhkan agar mampu memberikan pelayanan yang maksimal. “Contoh sekarang, Puslitbang mana yang relevan memberikan masukan kepada Biro Perencanaan kaitan dengan arah kebijakan strategis, yang memberi masukan kepada Biro



■ Pegawai Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan hendak memasuki gedung BKF Kementerian Keuangan di Jl. Gunung Sahari. BKF menjadi salah satu lembaga yang sudah melakukan penyederhanaan struktur birokrasi.

Organisasi dan Tatalaksana terhadap penataan organisasi Kemendagri yang ideal, siapa yang di Pusat Litbang? *Enggak* ada,” kata Noval. Karenanya, ia berharap restrukturisasi dilakukan secara menyeluruh termasuk di BPP agar dapat berbenah.

Momen pembenahan struktural sebenarnya ditunggu-tunggu BPP untuk melakukan penataan. Sama seperti Kepala BPP Kemendagri, Noval menyadari komposisi BPP saat ini lebih condong ke arah organisasi struktural ketimbang fungsional. Dirinya berharap kondisi yang demikian dapat diubah. Namun perubahan itu tidak seperti wacana yang bergulir saat ini, terkesan mendadak dengan tidak memberi kesempatan mengubah komposisi Puslitbang secara mendalam.

Padahal dengan komposisi saat ini, Noval mengaku kesulitan saat Mendagri menginginkan BPP merevisi UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Regulasi itu, kata Noval, memiliki banyak dimensi yang mesti dibagi dengan masing-masing Puslitbang. Dari kegiatan strategis itu,

rupanya ada beberapa dimensi yang tidak sesuai dengan Puslitbang, sehingga yang dilakukan adalah mengaitkannya. “Prioritas ini kebetulan tidak ada dengan kaitan penyusunan kebijakan kependudukan, apa mau kita paksakan? Akhirnya kita *meng-gatuk-gatukan* (menghubung-hubungkan) tadi,” katanya.

Tawaran perubahan BPP

Sementara itu, Noval mengusulkan adanya perubahan komposisi struktur yang dinilainya mampu menjadikan kerja BPP lebih efektif dan mengatasi persoalan yang ia sebutkan. Usulannya tidak hanya mengubah eselon III dan IV di Puslitbang untuk beralih ke fungsional, tetapi mengubah komposisi keempat Puslitbang. Perubahan itu seperti menempatkan dua Puslitbang mengurus penelitian dan pengkajian strategis, satu untuk mendukung internal Kemendagri, dan sisanya memfasilitasi inovasi daerah.

Tidak adanya kepala bidang yang membantu Kepala Puslitbang, dapat diatasi dengan menaruh satu pejabat

eselon III yang mengurus administrasi dan teknis. Dengan skema itu, pengerjaan kegiatan di Puslitbang tidak tersegmentasi sehingga lebih fleksibel. “*Ya* macam-macam komposisinya, tinggal tergantung selera, tetapi seleralnya berbasis kajian,” kata Noval.

Dirinya khawatir, langkah restrukturisasi yang dilakukan dengan tidak berbasis pada landasan akademik, hanya membuat organisasi tak efektif melaksanakan tugas dan fungsi. Akibat penataan yang serampangan, bisa saja di tengah jalan disadari sebagai kekeliruan. Padahal bongkar pasang organisasi akan berdampak pada aspek yang lebih luas, seperti persoalan anggaran yang berimbas pada lambatnya pelaksanaan program kerja. Karenanya proses waktu langkah perubahan juga patut diperhitungkan.

Terkait waktu, Noval meyarankan, agar perubahan itu tidak dilakukan saat proses penetapan anggaran sudah berjalan. Perubahan itu baiknya dilakukan pada pertengahan tahun, saat menyusun anggaran untuk periode mendatang. Nantinya, penyusunan itu

dapat disesuaikan dengan perubahan struktur yang bakal dilakoni. Dengan skema itu, diyakini rencana perubahan dapat terlaksana dengan baik. “Kita tata dari sekarang untuk 2021, termasuk penganggarannya tanpa mengganggu 2020,” katanya.

Ihwal kebutuhan kajian struktur organisasi, peneliti BPP Kemendagri bersedia melakukannya asal perencanaannya jelas. Hal itu diungkapkan salah satu peneliti BPP Kemendagri, **Imam Radianto**. Dirinya menyarankan agar Sekretariat Badan lekas membentuk tim yang bertugas membahas perubahan struktural tersebut. Sebelum mengusulkan restrukturisasi di tingkat Kemendagri, Imam menyarankan agar BPP lebih dulu mengkaji kondisi internal.

Imam sendiri sudah memiliki tawaran perubahan struktur BPP yang dinilainya lebih efektif. Usulan itu, lanjutnya, adalah dengan memindahkan seluruh jabatan eselon III dan IV baik di Puslitbang maupun Bagian Sekretariat menjadi pejabat fungsional. Kepala Bagian yang beralih menjadi fungsional, kata

Imam dapat berperan menjadi koordinator di masing-masing bagian.

Sementara itu, untuk tugas Kepala Puslitbang nantinya dibantu oleh sejumlah staf fungsional seperti yang mengurus perencanaan, keuangan, dan arsiparis. Jumlah staf itu juga tidak perlu melimpah, masing-masing bagian cukup digawangi dua orang. Setiap staf bertugas membantu dua Puslitbang. Secara penempatan, staf itu bukan berada di bawah Puslitbang, melainkan tetap di bawah koordinator bagian.

Imam menjelaskan, secara garis besar skema kerja yang dilakukan para staf nantinya. Misalnya di aspek perencanaan, mereka bertugas melayani apa yang menjadi kebutuhan peneliti untuk mengerjakan rencana penelitian. Staf itu kemudian menyusun permohonan kepada Bagian Perencanaan. “Saya mau *ngusulin* judul ini, dia buat suratnya, dia buat persiapan dokumennya, meminta ICP (*Idea Concept Paper*) ToR (*Term of Reference*) ke peneliti, jadi perencana ini yang membuat usulan ke Bagian Perencanaan,” tutur Imam. Saat Bagian Perencanaan ingin mempertanyakan usulan itu lebih lanjut, maka yang diundang adalah peneliti.

Sedangkan untuk komposisi Puslitbang, Imam mengusulkan adanya perubahan nomenklatur dan arah kerja. Usulan yang dimaksud Imam di antaranya, menempatkan Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Dalam Negeri, Pusat Pengembangan Kebijakan Strategis Pemerintahan Dalam Negeri, Pusat Inovasi Daerah, dan Pusat Pengembangan Pemerintahan Digital. Empat pusat itu masing-masing memiliki koordinator peneliti yang menangani berbagai urusan. Misalnya di Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Dalam Negeri yang menempatkan koordinator tentang otonomi daerah, keuangan daerah, kependudukan, tentang desa, dan urusan lainnya yang terkait. “Itu menjawab tantangan zaman sebenarnya,” tuturnya.

■ MUJAENI

REFORMASI STRUKTURAL MANDAT PRESIDEN



"Sangat penting bagi kita untuk mereformasi birokrasi kita. Reformasi struktural agar lembaga semakin sederhana, semakin simple, semakin lincah"



PENATAAN ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (pedoman untuk struktur organisasi Kementerian)

"PENYEDERHANAAN ESELONISASI BIROKRASI MENJADI 2 (DUA) LEVEL, DIGANTI DENGAN JABATAN FUNGSIONAL YANG MENGHARGAI KEAHLIAN DAN KOMPETENSI



PENATAAN STRUKTURAL

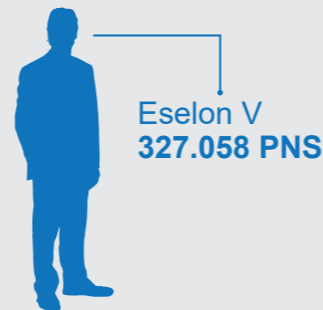
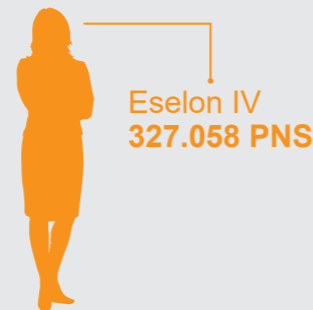
mengalihkan jabatan struktural eselon III ke bawah kedalam jabatan fungsional



PNS INDONESIA

Per 30 Juni 2019

4.286.918 pegawai



KOMPOSISI JABATAN STRUKTURAL

JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL KEMENDAGRI



USULAN SKEMA PENYEDERHANAAN

VERSI MINIMALIS

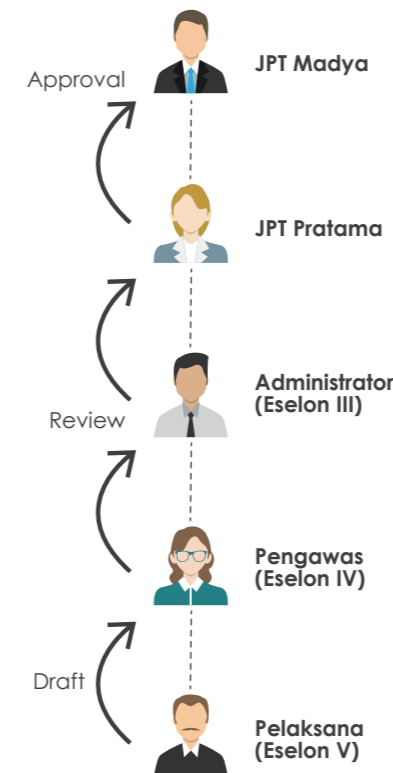
pengalihan:
11 pejabat eselon III
44 pejabat eselon IV

VERSI MAKSIMALIS

pengalihan:
284 pejabat eselon III
675 pejabat eselon IV

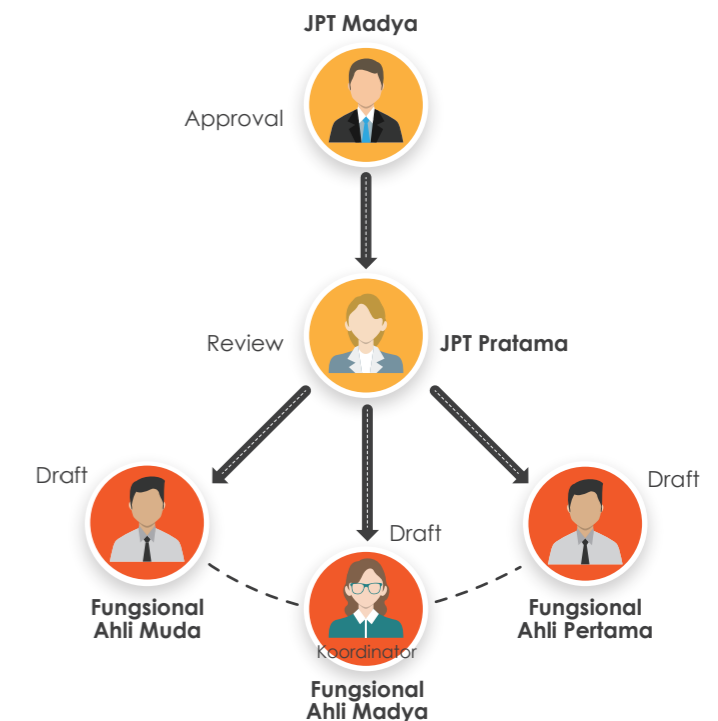
PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

KONDISI SEBELUM PENGALIHAN



Disposisi/Komunikasi berjenjang ke setiap tingkatan

KONDISI SETELAH PENGALIHAN



Disposisi/Komunikasi lebih fleksibel dan langsung ke fungsional

JAJAK MINAT JABATAN FUNGSIONAL

Penyederhanaan birokrasi bukan hanya menyoal komposisi jabatan, melainkan juga perlu menyiapkan sumber daya manusia. Meski bakal ada kemudahan untuk beralih ke fungsional, tetapi jabatan itu menekankan pada semangat minat seseorang. Jajak minat diperlukan untuk menuntun pilihan.

KEPALA Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Teguh Setyabudi, mengaku tidak sedikit pegawai yang menyampaikan keresahannya ihwal wacana penyederhanaan birokrasi yang terus bergulir. Dengan nada santai, Teguh berusaha menenangkan agar tak perlu khawatir dan tetap menunggu perkembangan dari kebijakan tersebut. “Kami itu sekarang kalau nyanyi, bukannya di sini senang di sana senang, sekarang kami nyanyinya satu judul, resah dan gelisah,” tutur Teguh, menirukan ungkapan seseorang kepada dirinya.

Ketua Pengarah Tim Penyederhanaan Birokrasi di Kemendagri itu menuturkan, sampai saat ini upaya penyederhanaan birokrasi masih terus berjalan. Ia terus mengamati perkembangan dari kebijakan tersebut, untuk kemudian dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri), melalui Sekretaris Jenderal. Komunikasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil



Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) terus dibangun. Hal itu dilakukan untuk menemukan formula penyederhanaan birokrasi yang tepat.

Teguh menyebutkan, seluruh komponen Kemendagri telah melaporkan usulan perubahan yang bakal dilakukan, termasuk di BPP Kemendagri. Laporan itu telah disampaikan kepada Mendagri untuk dibahas secara lebih lanjut dengan Kemenpan-RB.

Skema peralihan

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam proses penyederhanaan birokrasi adalah mengalihkan jabatan struktural ke fungsional. Teguh menyebutkan, skema yang diterapkan dalam

peralihan itu adalah *inpassing* jabatan. Dengan adanya arahan kebijakan Presiden terkait peralihan, disinyalir proses itu diikuti dengan kemudahan tertentu kepada para pegawai.

Kemudahan itu dinilai dapat membantu proses peralihan jabatan. Sebab, jika melihat regulasi, untuk menjadi pejabat fungsional dibutuhkan sejumlah kualifikasi. Misalnya untuk menjadi seorang peneliti, pegawai yang bersangkutan harus memenuhi beragam persyaratan yang diatur dalam Peraturan LIPI No 20 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti. Dalam aturan itu misalnya, untuk menjadi peneliti ahli pertama, muda, maupun madya diwajibkan memiliki kualifikasi pendidikan Strata 2. Meski begitu, secara rinci

■ Kesibukan para pegawai di salah satu ruang kerja di Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri.

kemudahan yang bakal didapatkan para pegawai yang hendak beralih jabatan belum dapat dijelaskan secara rinci, apakah dalam aspek pendidikan atau lainnya.

Meski digadang-gadang bakal ada kemudahan, peralihan itu tetap memerhatikan sejumlah aspek misalnya persoalan pendapatan yang bakal dikantongi pegawai. Teguh menuturkan, tingkat kesejahteraan itu berusaha dipastikan agar tidak berubah dari jabatan sebelumnya. “Presiden sudah menyampaikan bahwa transformasi kepada jabatan fungsional tertentu,

misalnya tingkat kesejahteraannya tidak berubah,” katanya. Hal ini membutuhkan perhitungan dari sisi keuangan secara cermat yang melibatkan sejumlah kementerian terkait.

Dorongan minat

Kendati sistem peralihan itu menggunakan *inpassing* jabatan, teguh menuturkan, Kemendagri tengah mencermati pola peralihan yang bakal diterapkan, apakah bersifat penawaran atau penugasan. Masing-masing skema itu dinilai memiliki kelebihan dan kekurangan. Andai skema penawaran yang diterapkan, maka belum tentu para pegawai struktural bersedia dialihkan ke fungsional. Namun, jika yang diterapkan adalah penugasan, maka

perlu adanya kecermatan. Sebab, tidak menutup kemungkinan yang bersangkutan justru menjadi kontra produktif dari jabatan sebelumnya. “Artinya dua hal itu perlu dikomunikasikan, kita perlu pencerminan analisis terhadap *track record*-nya dia, kemudian yang bersangkutan juga menyadari yang namanya PNS memang bukan hak, tetapi memiliki kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dilakukan, tetapi segala sesuatu dipaksakan biasanya *enggak* bakal bagus,” tuturnya.

Di sisi lain, kebijakan peralihan jabatan struktural ke fungsional membutuhkan persiapan kompetensi. Hal ini menjadi bagian pertimbangan Kemendagri dalam melakukan penyederhanaan birokrasi. Teguh mengatakan,



■ Ruang pejabat fungsional peneliti BPP Kemendagri

kompetensi itu tidak secara tiba-tiba dapat dimiliki pegawai yang beralih menjadi fungsional, sehingga perlu adanya peningkatan. Namun, pemberian kompetensi juga bergantung pada minat pegawai terhadap jenis jabatan fungsional yang diembannya. “Sangat tergantung pada *passion*, pada jiwa seseorang itu, dia diberikan ilmu tetapi tidak ada *passion* di situ, ini perlu kajian sebenarnya,” terang Teguh.

Berbagai pertimbangan itu, lanjut Teguh, bukan untuk memperlambat langkah penyederhanaan di Kemendagri, melainkan agar sesuai dengan tujuan kebijakan yang disampaikan Presiden. Teguh menyadari, ti-

dak semua pegawai berminat menjadi fungsional. Ia menyamakan dengan tidak semua orang pintar cocok menjadi seorang guru. Seperti halnya di BPSDM yang tidak semua orang pandai mampu menjabat sebagai fungsional widyaiswara.

Kepala Bidang Administrasi Kewilayahan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, dan Kependudukan, BPP Kemendagri, Agung Wijaya, tidak mempersoalkan jika mesti beralih menjadi jabatan fungsional. Melihat kebijakan itu merupakan instruksi Presiden dan menyangkut kepentingan luas. Namun hal yang perlu dicermati adalah skema pemindahan pejabat struktural menjadi fungsional. Jangan

sampai langkah itu dilakukan secara mendadak.

Sebelum memindahkan jabatan, Agung menyarankan perlunya menempuh sejumlah langkah, seperti menghitung kebutuhan formasi jabatan fungsional di dalam satu kementerian, termasuk masing-masing komponen. Hasil kebutuhan itu kemudian dijelaskan ihwal tugas dan fungsi jenis-jenis jabatan fungsional kepada pegawai. Sebab, tidak semua pegawai mengetahui tugas dan fungsi setiap jabatan. Melalui penjelasan itu pegawai bakal memiliki proyeksi jenis jabatan fungsional yang bakal diambil.

Senada dengan Teguh, Agung menuturkan untuk menjadi jabatan fungsional dibutuhkan dorongan minat. Berbeda dengan jabatan struktural yang mengemban tugas, jabatan fungsional lebih mengedepankan pada pengembangan diri. “Kalau menurut saya, fungsional itu mau hati,” tuturnya.

Karenanya ia menyarankan, agar peralihan itu diikuti dengan jajak minat sekaligus uji minat kepada para pegawai terhadap jenis jabatan fungsional tertentu. Dengan demikian, jabatan yang bakal dilakoninya sesuai dengan minat. Sebagai pegawai yang bekerja di BPP Kemendagri, Agung, sendiri belum tahu secara pasti dirinya bakal melabuhkan ke jenis jabatan fungsional apa jika dialihkan. Sebab, sejauh ini belum ada informasi terkait berapa banyak jumlah jabatan fungsional yang dibutuhkan Kemendagri termasuk BPP. Namun kemungkinannya, ia bakal memilih jabatan fungsional analisis kebijakan. “Tidak melulu kalau di Litbang harus menjadi peneliti, *enggak* kalau menurut saya,” katanya.

Menurut dokumen usulan penyederhanaan birokrasi di BPP Kemendagri, analisis kebijakan merupakan salah satu jenis jabatan fungsional yang diakomodasi. Namun, mengacu pada dokumen paparan Biro Organisasi Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kemendagri pada 21 Januari 2020, jenis fungsional yang diakomodasi untuk Puslit-

bang hanya peneliti dan perekayasa. Meski begitu, jenis fungsional perekayasa hanya diarahkan untuk eselon III dan IV di Puslitbang Inovasi Daerah yang terkena dampak peralihan.

Menanggapi pentingnya jajak minat, bersama timnya, Teguh bakal mencermati perlunya hal tersebut dilakukan. Di samping itu Teguh juga bakal terus mengikuti pembahasan bersama Kemenpan-RB. Kemendagri, lanjutnya, bakal taat asas bila keluar regulasi penyederhanaan birokrasi, baik berupa Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, maupun lainnya. “Kalau ada pedomannya, ada acuan dari tingkat pusat pasti kita akan ikuti,” katanya.

Regulasi penyetaraan

Kemenpan-RB sendiri telah mengeluarkan Peraturan Menpan-RB No 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Aturan yang ditetapkan pada 6 Desember 2019 itu mengatur sejumlah aspek, misalnya tahapan penyetaraan jabatan yang diatur dalam Pasal 5. Dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa untuk pelaksanaan penyetaraan jabatan, instansi pemerintah perlu melaksanakan beberapa langkah. *Pertama*, melakukan identifikasi jabatan administrasi pada unit kerja. *Kedua*, memetakan jabatan dan pejabat administrasi yang terdampak penyederhanaan birokrasi. *Ketiga*, memetakan jabatan fungsional yang dapat diduduki pejabat yang teralihkan. *Keempat*, melakukan penyalarsan tunjangan jabatan fungsional dengan administrasi dengan menghitung penghasilan dari sebelum dan sesudah dialihkan. *Kelima*, menyalarskan kelas jabatan fungsional dengan kelas jabatan administrasi

Selain itu, ihwal penyetaraan jabatan dari struktural (administrator, pengawas, dan pelaksana) ke fungsional juga diatur dalam Pasal 6. Misalnya pejabat administrator disetarakan dengan jabatan fungsional jenjang ahli madya, pejabat pengawas disetarakan dengan



■ Upacara rutin mingguan di Kementerian Dalam Negeri di Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta.

jabatan ahli muda, dan pelaksana (eselon V) disetarakan dengan fungsional ahli pertama.

Terkait aspek jenjang pendidikan yang harus dimiliki juga memiliki sejumlah keringanan. Seperti yang disebutkan Pasal 9. Pasal tersebut menjelaskan, baik administrator, pengawas, maupun pelaksana (eselon V) yang belum memiliki ijazah sesuai dengan persyaratan, dapat disetarakan dengan tetap melalui uji kompetensi. Kendati demikian pada ayat berikutnya, disebutkan pegawai yang bersangkutan wajib memiliki jenjang pendidikan sesuai dengan kualifikasi paling lama tiga tahun setelah dilantik. Sementara bagi administrator yang bakal diangkat menjadi jabatan fungsional ahli madya, yang mensyaratkan kualifikasi pendidikan Strata 2, wajib memiliki jenjang pendidikan tersebut paling lama 4 tahun sejak dilantik.

Apabila pejabat administrator, pengawas, maupun pelaksana belum memenuhi persyaratan jenjang pendidikan tetap dapat diberikan satu kali kenaikan pangkat, satu tingkat

lebih tinggi dalam jenjang jabatannya. Namun, hal itu tidak berlaku bagi kenaikan jenjang jabatan yang mengharuskan memenuhi kualifikasi pendidikan.

Selain itu, untuk tata cara pelaksanaan penyetaraan jabatan, diatur dalam Pasal 13. Tahap pertama yang perlu dilakukan instansi pemerintahan adalah menyampaikan hasil identifikasi pemetaan jabatan administrasi dalam jabatan fungsional yang bakal disetarakan, termasuk jabatan khusus yang harus diduduki oleh pejabat administrator kepada menteri. Kedua, menteri menyampaikan persetujuan terhadap usulan penyetaraan jabatan. Ketiga, pejabat pembina kepegawaian mengangkat dan melantik pejabat fungsional yang disetarakan. Pembina kepegawaian juga menyampaikan laporan penyetaraan beserta nama-namanya kepada menteri dengan tembusan Badan Kepegawaian Negara dan instansi pembina.

■ MUJAEANI

ATUR-ATUR STRUKTUR

Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan menjadi salah satu instansi yang telah merampingkan struktur organisasinya. Hal itu dilakukan di tengah bergulirnya arahan Presiden perihal perampingan. Bagaimana langkah itu dilakukan?

Menteri Keuangan Sri Muliyani Indrawati melantik 179 pejabat fungsional di Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Jumat, 29/11/2019. Dari angka itu sebanyak 112 orang berasal dari jabatan struktural eselon III dan IV. Mereka beralih dari jabatan struktural menjadi jabatan fungsional sebagai analis kebijakan melalui jalur penyetaraan (*inpassing*). Pelantikan itu berlangsung saat isu perampingan struktur birokrasi yang disampaikan Presiden Jokowi bergulir. Namun jauh sebelum isu itu ada, BKF telah menyusun kebijakan perombakan struktur tersebut.

Kepala Bagian Sumber Daya Manusia BKF, Wahyu Kusuma Romadhoni, menjelaskan ide perombakan organisasi di tubuh BKF sudah muncul sejak 2015, pasca lahirnya UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Salah satu

amanat aturan itu, yakni mengarahkan agar birokrasi semakin profesional dengan makin sedikitnya jabatan struktural. Kala itu jabatan Menteri Keuangan masih diemban Bambang Brodjonegoro. Bambang, kata Dhoni, menerima surat dari sekretariat DPR yang melaporkan adanya perubahan pemanfaatan jabatan analis kebijakan. Bambang kemudian melakukan disposisi ke BKF terkait perlunya mempertimbangkan penggunaan Jababatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK). Langkah itu guna memperkuat fungsi penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang fiskal dan sektor keuangan. Terlebih peran BKF sebagai lembaga *think tank* yang dimiliki Kementerian Keuangan.

Merespons hal itu, lembaga yang lahir pada 2006 itu, mulai melakukan berbagai kajian dan diskusi internal terkait perubahan organisasi. Puncaknya pada 2017, BKF menyusun naskah akademik ihwal perubahan struktur organisasi. “Artinya proses yang kami lakukan itu bukan serta-merta setelah Presiden memberikan arahan untuk melakukan restrukturisasi atau *de-layering*, tetapi kita sudah lakukan kajiannya itu sejak 2017,” tutur Dhoni, saat ditemui di kantornya, Selasa (21/1).

Meski naskah akademik sudah disusun sebagai acuan kebijakan, tetapi

langkah pengurangan jabatan struktural tidak langsung dilakukan. Dhoni mengatakan, instansinya terlebih dulu meninjau organisasi serupa BKF yang ada di negara luar. Selang beberapa waktu, Kepala BKF yang saat itu dijabat Suahasil Nazara, menyatakan sikap perlunya perubahan organisasi yang disampaikannya saat gelaran rapat kerja 2018. “Dipastikan kita (BKF) akan berubah organisasinya,” tutur Dhoni.

Membangun pemahaman

Mengubah organisasi tidak semudah membalikan telapak tangan. Dhoni mengatakan, langkah itu bukan hanya berurusan dengan konsep struktur

organisasi yang baru. Melainkan juga mempertimbangan keberadaan para pegawai. Aspek itu diakui Dhoni sebagai tantangan terbesar bagaimana dapat mengkomunikasikan rencana perubahan kepada para pegawai. Dirinya bersyukur, saat itu Kepala BKF Suahasil banyak berperan menjelaskan alasan perubahan setiap kali ada momen rapat atau pertemuan. Meski tidak semua pegawai langsung menerima, tetapi dengan upaya itu sebagian besar meyakini perubahan yang bakal dilakukan akan membawa ke arah kerja yang lebih baik.

Ia tak menampik, sebuah perubahan yang dilakukan bakal membuat orang

resah. Karena itu, lanjutnya, perlu ada orang yang meyakinkan bahwa perubahan yang ditempuh merupakan upaya menjadi lebih baik. Dirinya masih mengingat pernyataan Suahasil saat mengawal perubahan. Suahasil saat itu, menyadari perubahan yang dilakukan bukan tanpa masalah. Dan masalah itu tidak dapat diatasi oleh pimpinan atau satu pihak, tetapi diselesaikan secara bersama-sama. Lelaki yang saat ini menjabat Wakil Menteri Keuangan itu juga meyakinkan, bahwa pimpinan selalu bersama para pegawai. Artinya, lanjut Dhoni, saat didapatkan pada masalah, pegawai tidak mesti menyelesaikan sendiri. “Tetapi kami diyakinkan bahwa pimpinan di

BKF itu bersama kami mengawal perubahan itu benar-benar terjadi,” terangnya.

Salah satu isu terkait perubahan adalah persoalan pendapatan. Dalam memberikan pengertian terhadap perubahan, keterbukaan kepada pegawai menjadi kunci. Dhoni menyatakan, kelebihan dan kekurangan terkait perubahan disampaikan kepada para pegawai, misalnya membandingkan tunjangan yang bakal dikantongi saat menjabat sebagai struktural maupun fungsional. Aspek itu berusaha dipastikan agar tidak mengalami penurunan dari sebelumnya. Dhoni menyebutkan, tunjangan seorang analis kebijakan madya



dengan eselon III mengalami sedikit penurunan. Namun, hal sebaliknya justru terjadi pada analisis kebijakan muda dibanding saat duduk di eselon IV.

Perubahan organisasi ke arah fungsional sebenarnya menguntungkan bagi para pegawai. Dhoni menuturkan, BKF memiliki jumlah sumber daya manusia yang potensial menduduki jabatan lebih tinggi begitu melimpah. Namun, kursi jabatan struktural cenderung tidak berubah. Padahal BKF menuntut pegawainya untuk terus meningkatkan kapasitasnya, dengan mengikuti tugas belajar atau izin belajar. Untuk menjaga motivasi tersebut, karier sebagai fungsional menjadi solusi, karena formasinya lebih fleksibel dibanding struktural.

Di sisi lain, perubahan itu lebih mengondisikan pemerataan beban sekaligus fleksibilitas dalam bekerja. Dhoni menambahkan, dengan nomenklatur di masing-masing bidang dan subbidang, membuat para pejabat eselon III dan IV enggan untuk bekerja di luar pekerjaan mereka. Mereka cenderung tidak membantu apa yang sedang dikerjakan pegawai lain. Pada kondisi tertentu, hal ini memungkinkan adanya ketimpangan beban kerja, di mana salah satu bidang memikul beban lebih banyak ketimbang bidang lainnya. Melalui jabatan fungsional analisis kebijakan, Dhoni berharap para pejabat bisa lebih fleksibel berkolaborasi dengan bidang apa saja dan pembagian beban kerja dapat lebih merata.

Jajak minat

Sementara itu, untuk memetakan minat karier jabatan fungsional, dilakukan survei kepada pejabat eselon III dan IV. Tak hanya itu, survei juga dilakukan kepada jabatan pelaksana yang secara jenjang pendidikan maupun pangkat memenuhi persyaratan perpindahan jabatan. Pilihan jajak minat itu tidak sebatas memberi pilihan karier di jabatan fungsional, tetapi yang bersangkutan diberi leluasa memilih untuk tetap bertahan di jabatan struktural. Kalaupun

berubah kepada jabatan fungsional, mereka mesti memilih apakah sebagai analisis kebijakan, peneliti, atau lainnya. Untuk meyakinkan pilihan yang diambil, survei dilakukan dua kali.

Dhoni menyebutkan, langkah persiapan itu dilakukan secara paralel, baik perubahan strukturnya maupun sumber daya manusianya. “Supaya ketika kita kemudian bikin organisasi yang seperti apa, orangnya itu pun sudah sesuai dengan organisasi yang kita bentuk,” tuturnya. Dari jajak minat yang dilakukan, lanjut Dhoni, sebanyak 70 persen memilih JFAK.

Banyaknya minat tersebut bukan tanpa alasan. Dhoni menjelaskan, kerja-kerja yang dilakukan struktural BKF secara tugas dan fungsi dapat dikatakan tidak jauh berbeda dengan peran jabatan analisis kebijakan. Bahkan, *output* yang dihasilkan dari kerja jabatan struktural itu juga serupa analisis kebijakan. “Dan itu memang sesuai dengan nama BKF,

Badan Kebijakan Fiskal, sehingga yang kita hasilkan itu adalah rekomendasi kebijakan kepada Menteri Keuangan,” katanya. Dengan demikian, wacana terkait penyesuaian kompetensi level yang dimiliki masing-masing pegawai tidak menjadi soal. Hal itu, kata Dhoni, dibuktikan dengan tidak munculnya persoalan konten meski perubahan sudah dilakukan.

Kendati begitu, secara pola kerja memang berubah. Sebelumnya, saat menduduki jabatan struktural mereka memiliki bawahan yang dapat membantu pekerjaan. Tak hanya itu, mereka juga memiliki atasan yang selalu memberikan arahan. Namun, dengan posisi jabatan fungsional seperti sekarang, mantan kepala bidang dituntut

■ Eko Nugroho Mardi Saputro salah satu pejabat BKF yang berpindah jabatan bersama jurnalis Media BPP melakukan sharing menggunakan podcast.



lebih mandiri. Ia juga dapat bertindak sebagai ketua tim, atau di lain waktu menjadi anggota bergantian dengan lainnya.

Namun, transisi budaya semacam itu tidak terlalu sulit. Terlebih kata Dhoni, selama ini BKF menerapkan budaya kerja egaliter baik antara pimpinan dengan bawahan maupun sebaliknya. Hal itu ditunjukkan misalnya dalam menyampaikan pendapat, pun mengoreksi jika terdapat kesalahan. Dengan budaya itu, para pegawai tidak begitu kesulitan untuk beradaptasi terhadap perubahan, termasuk saat pejabat eselon III menjadi fungsional. “Pimpinan di BKF selalu memberikan kesempatan *speak up*, untuk ngomong dan ketika kita berubah sebagai analisis kebijakan itu juga relatif lebih *smooth*, karena tidak terlalu berasa,” katanya. Meski tidak dipungkiri ada segelintir pegawai yang merasa kehilangan bawahan dan fasilitas.

Salah satu pejabat struktural eselon III yang pindah itu, adalah **Eko Nugroho Mardi Saputro**. Dengan skema perpindahan *inpassing*, kini ia menjabat sebagai analis kebijakan madya. Sebelum adanya perubahan, Eko menjabat sebagai Kepala Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan Bilateral. Meski begitu, kata Eko, tugas dan fungsi jabatan barunya ini hampir tak jauh berbeda dengan yang selama ini ia kerjakan sebagai kepala bidang. Hanya saja, jika dulu pekerjaannya dibantu oleh sejumlah staf, kini ia dituntut untuk lebih mandiri. Tak hanya itu, fasilitas kendaraan dinas juga tidak lagi dinikmati. Namun ia menegaskan hal itu tidak menjadi soal.

Eko menuturkan alasannya lebih memilih sebagai analis kebijakan ketimbang peneliti. Menurutnya, peran peneliti lebih pada menghasilkan produk yang memiliki manfaat jangka panjang. Sedangkan analis kebijakan, menghasilkan dampak yang lebih cepat untuk memengaruhi kebijakan. “*Nah* saya tertarik di sana, impactnya lebih bagus,” katanya. Ia menyebutkan posisi analis kebijakan di BKF bukan sebagai jabatan tambahan. Dengan komposisi sekarang, BKF justru lebih didominasi oleh jabatan fungsional.

Belum ideal

Meski penyederhanaan struktur organisasi sudah dilakukan, Dhoni mengaku bentuknya belum ideal seperti yang diinginkan Presiden Jokowi. Ia membandingkan dengan kebijakan yang diambil Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) yang memangkas secara luas eselon III dan IV.

Dhoni menuturkan, tidak semua pejabat eselon III dan IV di BKF dipindah menjadi jabatan fungsional. Hanya pejabat di bidang teknis saja yang dipindah, karena secara umum pekerjaan yang dilakukan serupa JFAK. Sementara di masing-masing pusat

masih menempatkan dua bidang yang diduduki oleh eselon III yang dibantu masing-masing tiga eselon IV. Jabatan itu ditekankan memberi dukungan pada dua aspek yakni, tata kelola administratif dan urusan substansi serupa *project manager* yang membantu kajian yang tengah disusun kelompok JFAK. Kedua posisi itu dibutuhkan untuk membantu Kepala Pusat yang mesti membawahi banyak JFAK. “Bisa dibayangkan JPT (Jabatan Pimpinan Tinggi) yang rentang kendalinya, kemudian sekarang menjadi puluhan bahkan rata-rata 20 sampai 25 analis kebijakan, artinya dia butuh asisten, orang yang membantu itu semua,” katanya. Dengan kebijakan ini, BKF berhasil mengurangi eselon III dari semula 31 menjadi 12 orang. Sedangkan untuk eselon IV dari angka 111, berkurang menjadi 36 orang.

Karena dinilai belum ideal, Kemenpan-RB tetap meminta BKF untuk kembali melakukan penyederhanaan. Namun, Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Kemenkeu, meminta agar BKF terlebih dulu fokus mengelola perubahan yang telah dilakukan. Supaya ini bisa menjadi pembelajaran bagi instansi lain ihwal mengelola perubahan.

Dhoni mengatakan, pada tahun kedua atau tiga setelah penyederhanaan, bakal dilakukan evaluasi khususnya pada dua bidang di masing-masing pusat. Sebenarnya, saat pembahasan mengenai penempatan jumlah bidang itu melewati diskusi yang alot. Saat diskusi berlangsung, suara terbagi menjadi dua kubu, antara yang mengusulkan cukup satu bidang, dengan yang menyarankan dua bidang. Kemudian diambil jalan tengah, yaitu menempatkan dua bidang, dengan catatan bakal dievaluasi saat dua atau tiga tahun berjalan. “Akhirnya komprominya adalah yaudah kita transisi dulu dua atau tiga tahun kita lihat apakah dua (bidang) itu atau kemudian menjadi satu,” katanya.

■ MUJAENI

Tetap Fokus Mengembangkan Komoditas Lokal

BADAN Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Sumatera Utara terbentuk pada Agustus 2002. Pembentukan Balitbang Provinsi Sumatera Utara tersebut berdasar pada Peraturan Daerah No 4 Tahun 2001 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara, serta Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No 611.1-434.K/Tahun 2002 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara.

Seperti Badan Penelitian dan Pengembangan lainnya, Balitbang Provinsi Sumatera Utara bertugas membantu Gubernur di Bidang Penelitian dan Pengembangan. Misalnya, melaksanakan urusan pemerintahan daerah/kewenangan Provinsi di bidang kesekretariatan, pemerintahan dan pengkajian peraturan, sosial dan kependudukan, ekonomi dan pembangunan, serta inovasi dan teknologi.

Pada awal November 2019, Tim Media BPP mengunjungi Balitbang Provinsi Sumatera Utara dan berdiskusi langsung dengan Kepala Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi, Deni Syahputra. Deni Syahputra mengatakan pada 2019, Balitbang Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan beberapa kegiatan yaitu kegiatan penelitian, sosialisasi, koordinasi, dan kegiatan penguatan SIDA (Sistem Inovasi Daerah) dari Kementerian Riset dan Teknologi (Kemristek). Balitbang Provinsi Sumatera Utara juga telah menjalankan program dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

tentang kluster inovasi dan juga mensosialisasikan Pusat Jejaring Inovasi Daerah (Puja Indah).

“Tahun ini kita sudah ada kegiatan penguatan SIDA, kita juga sudah menyusun *road map* SIDA tersebut. Untuk produk unggulan di Provinsi Sumatera Utara masih di sekitar sawit, karet dan kopi,” katanya.

Deni Syahputra menjelaskan Balitbang Provinsi Sumatera Utara memiliki 4 (empat) bidang, di antaranya Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Bidang Sosial dan Kependudukan, Bidang Ekonomi dan Pembangunan, serta Bidang Inovasi dan Teknologi. Setiap bidang menghasilkan 3 (tiga) kegiatan penelitian, kecuali Bidang Inovasi dan Teknologi hanya menghasilkan 1 (satu) kegiatan penelitian.

“Total Penelitian yang telah dilaksanakan yaitu 10 kegiatan penelitian. Salah satunya, Pengembangan Kluster Inovasi Berbasis Produk Unggulan Daerah (PUD) Kopi Provinsi Sumatera Utara. PUD Kopi tersebut merupakan hasil penelitian pada Bidang Inovasi dan Teknologi, dengan anggaran penelitian sekitar 200 juta,” ucapnya.

Kopi Sumatera Utara

Pada 2019, Balitbang Provinsi Sumatera Utara telah melakukan penelitian pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD) yaitu kopi. Kopi merupakan salah satu produk unggulan daerah yang dikembangkan di Provinsi Sumatera Utara. Pengembangan kopi ini berdasar pada hasil penelitian di 10 daerah kabupaten penghasil kopi yang me-



■ Gedung Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara. SUMBER/ balitbang.sumutprov.go.id

■ BAWAH: Kepala Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi, Deni Syahputra



iliki rasa dan ciri khas yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Kopi yang dikembangkan terdiri dari 5 (lima) jenis, di antaranya kopi arabika Simalungun, kopi arabika Sumatera Mandailing, kopi arabika Sumatera Lintong, kopi arabika Sipirok, dan kopi arabika Pulo Samosir, kopi arabika dan robusta Dairi, serta kopi arabika Karo.

Kopi dari Sumatera Utara meskipun bukan merupakan komoditas dengan produksi tertinggi di masing-masing daerah kabupaten, namun memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan menjadi PUD. Berdasar data dari Dinas

Perkebunan Provinsi Sumatera Utara pada 2017 komoditas kopi yang dihasilkan mencapai 66.539,81 ton dengan luas lahan yang ditanam 86.911,09 hektare yang terdiri dari tanaman kopi arabika seluas 69.304,92 hektare dengan jumlah produksi 58.005,09 ton dan tanaman kopi robusta seluas 17.606,17 hektare dengan jumlah produksi 8.484,72 ton.

Dalam upaya mewujudkan kopi sebagai PUD, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota telah melakukan berbagai kegiatan terkait dengan pengembangan kopi di Sumatera Utara seperti melaksanakan berbagai kegiatan festival kopi, mem-

berikan bantuan bibit bersertifikasi dan pupuk organik untuk program peremajaan kopi dan perluasan areal perkebunan kopi rakyat, memberikan bantuan peralatan pengelolaan kopi, melakukan sosialisasi budidaya kopi yang baik, promosi kopi sebagai salah satu ikon wisata daerah dengan cara melakukan dan mengikuti berbagai pameran, dan memfasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual di bidang indikasi geografis.

Sebagai PUD, pengembangan kopi perlu perhatian serius semua *stakeholder* di Sumatera Utara. Pasalnya, selama ini banyak permasalahan yang dihadapi para petani dan pelaku usaha dalam pengembangan kopi di Sumatera Utara seperti kurangnya ketersediaan bibit yang berkualitas, tidak adanya standar baku untuk hasil pengelolaan kopi, kurangnya *input* teknologi dalam pengelolaan hasil panen, harga yang tidak stabil akibat adanya regulasi yang mengatur harga pasar kopi terutama untuk ekspor.

Untuk itu, penelitian yang dilakukan Balitbang Provinsi Sumatera Utara merekomendasikan pelbagai upaya yang melibatkan seluruh *stakeholder*, dimulai dari hulu hingga hilir guna mengatasi permasalahan tersebut. Adapun cara yang ditempuh Balitbang Provinsi Sumatera Utara yaitu melalui kolaborasi ABGC (*Academy Business Government Community*). Kolaborasi tersebut mengupayakan pengembangan kopi melalui aktivitas inovatif peningkatan interaksi secara intensif, pemakaian fasilitas bersama, pertukaran pengetahuan dan keahlian yang berkontribusi secara efektif dalam indentifikasi dan akuisisi teknologi, implementasi model bisnis, rantai nilai (*value chain*), rantai pasok (*supply chain*), serta jaringan kelembagaan dan diseminasi informasi.

■ FRISKA NATALIA

Pasca Gempa, Lombok Tetap Jadi Primadona

Bencana gempa yang sempat mengguncang Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada 2018 lalu, tak mampu memudahkan magnet kunjungan ke daerah tersebut. Daerah itu terus bangkit dan berbenah diri. Kekayaan alam dan budaya menjadikan Lombok sebagai wisata primadona.

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio turun dari mobil berwarna hitam di area Pantai Kuta Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Rabu (27/11/2019). Mengenakan kemeja putih berkaca mata hitam, Wishnutama datang bersama Wakil Menteri Pariwisata Angela Herliani Tanoesoedibjo, dan Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah. Sontak kedatangan Menteri Pariwisata itu menarik perhatian para pengunjung.

Wishnutama melangkah kakinya menyusuri sudut sekitar Pantai Kuta Mandalika. Ia juga melihat sejumlah fasilitas penunjang aktivitas wisata di daerah tersebut. Tempat pariwisata menurutnya harus berdampak langsung kepada masyarakat terutama di bidang ekonomi. Masyarakat dapat merintis berbagai ekonomi kreatif, misalnya di bidang kuliner, *fashion*, kriya dan beragam usaha lainnya. Terlebih Mandalika menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), tengah membenahi beragam fasilitas. Wishnutama menekankan, akses wisatawan terhadap beragam tempat wisata itu penting karena akan menumbuhkan berbagai sektor ekonomi kreatif. "Jangan sampai pembangunan infrastruktur itu tidak dapat dirasakan oleh masyarakat di daerah tersebut," tutur Wishnutama.

Tak jauh dari lokasi itu, terdapat bangunan yang bakal menjadi sirkuit

helatan Moto GP pada 2021 mendatang. Wishnutama juga menengok persiapan kegiatan itu. Ia mengadag-gadag gelaran untuk pertama kalinya di Indonesia itu, akan menjadi helatan yang terbaik.

Saat gempa mengguncang Lombok 2018 lalu, kawasan wisata Mandalika tidak begitu terdampak dibanding Gili Trawangan, dan Gunung Rinjani. Mandalika menjadi tempat wisata yang tersohor di Lombok dan boleh dibilang destinasi wisata "wajib" wisatawan, saat mengunjungi daerah yang dikenal Pulau Seribu Masjid itu. Hamparan pasir putih, laut yang biru, dan perbukitan yang hijau, seolah menjadi magnet bagi wisatawan dari lokal maupun mancanegara. Jika ingin menikmati *land-*



■ Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Lombok Tengah



■ Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio bersama Wakil Menteri saat mengunjungi Mandalika



■ Pengunjung hendak memasuki kawasan Desa Wisata, Desa Sade di Lombok, NTB

scape yang berbeda, pengunjung dapat menikmatinya dari atas ketinggian dengan mendaki perbukitan sekitar pantai. Dari atas ketinggian, hamparan laut biru pasir putih dan perbukitan yang hijau akan menambah kesan eksotis.

Jaraknya yang hanya sekira 24 kilometer dari Bandara Internasional Lombok menggunakan mobil, membuat destinasi wisata ini tepat untuk menikmati deburan ombak mengawali perjalanan di Lombok. Apalagi tak jauh dari Kuta Mandalika terdapat pantai lain yang bisa dikunjungi, di antaranya Pantai Seger, Pantai Tanjung Aan, Pantai Mawun dan Pantai Selong Belanak, ada pula Bukit Merese.

Perjalanan dari Bandara Internasional Lombok menuju Mandalika nyaris tanpa hambatan. Jalanan aspal yang mulus, pemukiman, dan bukit menjadi panorama sepanjang perjalanan. Sesampainya di Kuta Mandalika, kios-kios berjejer menjajakan makanan ringan serta oleh-oleh. Namun ada pula para pedagang yang berkeliling menjajakan dagangannya. Mereka menjual kain khas Lombok dan aksesoris gelang kerajinan tangan daerah setempat. Mereka langsung menghampiri setiap pengunjung yang baru saja turun dari mobil. Sambil mengikuti langkah wisatawan, mereka terus menyodorkan barang dagangan. Hal ini sedikit banyak bikin pengunjung tak nyaman sehingga perlu dibenahi. Sebab bisa saja wisawatan merasa jengah karena selalu dibuntuti pedagang. Perhatian pemerintah atau pemangku kepentingan setempat dibutuhkan, agar Lombok lebih ramah terhadap wisatawan.

Tak jauh dari Pantai Kuta Mandalika, tempat lain yang menarik disinggahi *Media BPP* adalah Kampung Sade. Sebuah pemukiman masyarakat suku sasak yang masih bertahan di Lombok Tengah. Sade memiliki arti kesadaran atau obat. Sekira 155 rumah dengan penduduk 700 orang tinggal di kampung ini. Kampung Sade terletak di Desa Rambitan, Kecamatan Jumputan, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sebagai kampung adat, rumah warga masih menggunakan bangunan model lama, beratap alang-alang, berdinding anyaman bambu, dan berlantai tanah liat. Ada yang menarik dari kebiasaan warga Kampung Sade dalam merawat rumah. Untuk membersihkan lantai, biasanya warga memanfaatkan kotoran sapi atau kerbau dengan cara melumurnya secara berkala. Mereka percaya dengan begitu lantai akan mengilap, kuat, tidak lembab, dan terhindar dari nyamuk.

Rumah tertua di Kampung Sade berumur 15 generasi. Rumah itu diyakini sebagai bangunan pertama yang berdiri. Sampai saat ini bangunan itu tetap dijaga keasliannya, meski setiap delapan tahun sekali atapnya diganti.

Kebanyakan mata pencaharian warga di Kampung Sade adalah petani, dengan masa panen sekali dalam setahun, tetapi ada pula yang melakoni sebagai peternak. Untuk menyiasati pendapatan agar dapur tetap mengepul, perempuan di kampung itu bekerja sebagai penenun. Pengunjung juga dapat melihat proses pembuatan benang dan teknik menenun yang masih menggunakan cara tradisional. Menyusuri perkampungan Sade serupa masuk dalam pameran kain khas Lombok dengan latar rumah tradisional. Ada yang berupa slem-pang, sarung, gelang dan bentuk lainnya.

Bukan tanpa alasan perempuan di kampung ini memilih bekerja sebagai penenun ketimbang merantau ke luar kampung. Mereka khawatir saat bekerja jauh dari rumah, bakal terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya ada yang menculik. Sehingga mereka tidak diizinkan untuk beranjak terlalu jauh dari



■ Pantai Tanjung Aan dari bukit, salah satu pantai di kawasan Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).

kampung. “Karena perempuan di sini *enggak* dikasih kerja di luar, jadi kalau *enggak* pergi ke sawah mereka menenun karena takut nanti diculik,” kata Seni (33), pemandu di Kampung Sade.

Dalam melestarikan adat, warga Kampung Sade memanfaatkan garis keturunan. Agar adat tetap lestari, orang di kampung itu biasanya menikah dengan sepupu mereka sendiri. Meski tidak menutup kemungkinan, ada pula yang menikah dengan orang di luar Kampung Sade jika keduanya saling menyukai.

Setiap pemuda yang ingin menikah terlebih dulu harus “menculik” calon mempelai wanitanya selama satu malam. Keesokan harinya, salah seorang perwakilan dari calon mempelai laki-laki mendatangi keluarga calon mempelai wanita sebagai utusan atau pelapor. Dengan cara menculik calon mempelai wanita, pihak keluarga merasa terhormat ketimbang melamar dengan cara baik-baik.

Di desa itu juga terdapat pohon tak berdaun, hanya batang dan beberapa dahan. Di bawah pohon itu dikelilingi batu yang membentuk pot. Orang sekitar menamainya pohon

cinta, karena sering menjadi lokasi janji-janji berjumpa para muda-mudi yang hendak menikah. Mereka biasanya bertemu di bawah pohon itu untuk “diculik” agar dapat melangsungkan resepsi pernikahan.

Taman Narmada

Beranjak dari Kampung Sade, *Media BPP* mengunjungi wisata Taman Narmada yang berada di Desa Lembuak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Pendirian taman ini dilakukan oleh Kerajaan Mataram dari dinasti Karangasem, pada masa Raja I Gusti Ngurah Ketut Karangasem dan I Gusti Gede Karangasem. Proses pembangunan situs Cagar Budaya Taman Narmada ini membutuhkan waktu selama 27 tahun, sejak tahun 1852 hingga 1879. Nama Narmada disyalir pengaruh dari anak Sungai Gangga di India yang dianggap suci umat Hindu. Sebelumnya, kerajaan berlatar Hindu pernah berkuasa di Lombok yang saat itu melakukan invansi dari Bali.

Dahulu taman ini digunakan sebagai tempat peristirahatan raja saat musim kemarau atau bisa disebut juga istana musim panas. Pada kompleks Taman Narmada terdapat replikasi Telaga Segara Anak yang ada di



■ Pantai Senggigi, salah satu lokasi favorit menyaksikan matahari terbenam di Lombok

Gunung Rinjani. Telaga ini lebih mirip kolam, yang pada zamannya digunakan sebagai tempat pemandian para selir raja. Raja biasanya melihat para selir bermain air dari bangunan berbentuk panggung yang disebut Bale Terang.

Menurut pemandu wisata Taman Narmada, Edi Wijaya, replika Gunung Rinjani sengaja dibuat untuk lokasi ritual raja. Saat itu raja telah berusia lanjut dan secara fisik tidak kuat lagi memimpin upacara langsung di telaga yang berada di puncak Gunung Rinjani tersebut. “Kalau kita naik ke sana, seolah-olah kita menaiki Gunung Rinjaninya,” tutur Edi.

Salah satu bagian Taman Narmada



■ Taman Narmada

yang banyak dikunjungi adalah Bale Petirtaan. Bale Petirtaan lokasinya tak jauh dari pintu masuk, persis di sebelah kolam pemandian selir. Tampak luar, arsitektur bangunannya sangat mirip atau khas dengan bangunan-bangunan di Bali. Bangunannya pun kecil, hanya mampu muat sekitar 10-an orang.

Di Bale Petirtaan inilah terdapat pertemuan 3 mata air, yakni mata air Surandi, Lingsar dan Narmada. Bagi umat Hindu, airnya dipercaya dapat membuat awet muda, mengantarkan rezeki dan menghilangkan berbagai penyakit. Mata airnya ditampung dalam satu kolam kecil dan terus mengalir. Kepercayaan inilah yang membuat banyak pengunjung penasaran dan mencoba peruntungannya dengan air tersebut.

Senja di Senggigi

Setelah berkeliling ke beberapa tempat, kini saatnya menikmati suasana sore di Lombok. Ada beberapa tempat yang menarik untuk menikmati sore hari di Lombok, salah satunya adalah Senggigi. Daerah ini terletak di sebelah barat pesisir Pulau Lombok, tepatnya berada di Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat. Jarak tempuh sekira 1 jam dari Bandara Internasional Lombok ke Senggigi, atau sekitar 20 menit dari pusat

Kota Mataram.

Keindahan alam Senggigi cukup menakjubkan, dengan beberapa pantai berteluk yang panjang di mulai dari selatan, yaitu Pantai Batulayar, Batu Bolong, Senggigi, Kerandangan dan Mangsit. Di setiap tempat tersebut memiliki keindahan tersendiri yang dapat dinikmati ketika berkunjung ke Senggigi.

Pantai Batulayar misalnya, merupakan tempat wisata religi bagi umat muslim dan juga tempat diadakannya acara tahunan Suku Sasak yaitu Lebaran Topat yang biasanya diadakan seminggu setelah Idul Fitri, di pinggir jalan yang bertebing di pesisir pantai terdapat gardu pandang untuk menikmati pemandangan. Sedangkan di Pantai Batu Bolong terdapat pura tua umat hindu yang didirikan di atas batu hitam yang menjulur ke laut, batu ini memiliki lubang yang di gunakan sebagai akses jalan. Pura Batu Bolong merupakan destinasi yang ramai dikunjungi.

Media BPP memilih Pantai Senggigi untuk menikmati sore di Lombok. Sebagai tempat yang banyak dikunjungi pantai ini memiliki kebersihan yang cukup terjaga. Di sepanjang bibir pantai kafe-kafe berjajar menyajikan berbagai menu andalan. Serupa Bali yang menjadi tempat kunjungan para turis mancanegara, Pantai Senggigi pun demikian. Hampir di setiap spot di tempat ini diisi oleh turis asing, ada yang menikmati deburan ombak dengan duduk di bibir pantai, berenang, atau sekadar bersantai dengan beberapa kudapan. Meski begitu wisatawan dalam negeri juga tak kalah banyak.

Semakin sore, pantai ini kian dipadati pengunjung, alunan musik dari panggung di salah satu cafe seolah mengiringi kepergian mentari ke tempat persinggahannya. Sejumlah orang megabadikan momen itu. Langit biru yang perlahan-lahan berubah jingga lalu gelap, melengkapi perjalanan *Media BPP*.

■ MUJAENI



Riyanarto Sarno

Dosen Teknik Informatika ITS

Tempat Tanggal Lahir :

Surabaya, 3 Agustus 1959

Pendidikan :

S1 Teknik Elektro ITB

S1 Ekonomi UNPAD

S2 Computer Science
University of New Brunswick
Canada

S3 Computer Science
University of New Brunswick
Canada



LEBIH DEKAT

Menegakkan Tri Dharma Perguruan Tinggi

TUGAS dosen bukan hanya mengajar, melainkan meneliti, dan mengabdikan kepada masyarakat. Tiga hal yang sering disebut tri dharma perguruan tinggi ini saling terkait. Kesadaran ini dipahami betul oleh **RIYANARTO SARNO (60)**. Dosen Institut Teknologi Sepuluh Nopember itu, terus bergeliat meningkatkan penelitiannya. Tak hanya berhenti pada publikasi ilmiah, penelitiannya juga berakhir menjadi sebuah produk bernilai guna.

R IYANARTO baru saja menyelesaikan rapat bersama anggota Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, di salah satu hotel di Jakarta. Sebab anggotanya banyak dari luar ITS, rapat digelar di Ibu Kota. Ia juga sering berpergian ke perguruan tinggi di beberapa daerah untuk mengajarkan kepiawaian menulis karya ilmiah. Meski memiliki agenda yang padat, Riyanarto tetap produktif menghasilkan produk penelitian. Berkat produktivitasnya itu, akhir 2019 lalu, dirinya berhasil menyabet penghargaan bergengsi bagi para akademisi dan peneliti di Indonesia. Ia berhasil meraih peringkat pertama publikasi ilmiah ilmu pengetahuan dan teknologi kategori penulis pada gelaran *Science and Technology Index (Sinta) Award* 2019. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang saat itu dijabat Mohammad Nasir. Tahun sebelumnya, Riyanarto hanya mampu bertengger di posisi ketiga dengan kategori yang sama.

Meski menjuarai *Sinta Award*, ia mengaku tidak terlalu menargetkan harus unggul dalam ajang tersebut. Dalam berkarya, ia mengalir begitu saja dengan tetap melakukan kerja-kerja produktif. Prinsipnya, selagi memiliki rekam jejak yang bagus, nantinya akan selaras dengan hasil yang didapat.

“Pokoknya kita berprestasi yang bagus, nanti rezeki datang,” katanya saat ditemui di Jakarta, Selasa (14/1).

Bagi Riyanarto, penelitian menjadi hal penting yang mesti dilakoni para dosen. Melalui penelitian, dirinya tak hanya menghadirkan teori-teori yang sudah umum diketahui kepada mahasiswanya. Namun, ia juga menyuguhkan beragam pengetahuan baru yang didapatnya dari hasil penelitian. Langkah itu diyakini dapat menumbuhkan ketertarikan mahasiswa untuk aktif dalam proses belajar. Lewat penelitian dan pengajaran, peran pengabdian kepada masyarakat juga dapat didukung. Misalnya menerapkan hasil penelitian menjadi produk yang mampu memberikan manfaat secara luas.

Penelitian, katanya, menjadi perhatian di negara-negara maju. Kampus-kampusnya pun memiliki lingkungan akademik yang mendukung untuk memudahkan orang meneliti. Menurutnya, bangsa yang penelitiannya maju, akan selaras dengan lahirnya beragam produk inovasi. Negara yang demikian, dapat menjadi unggul di antara bangsa lainnya.

Ia menyayangkan, budaya semacam ini masih belum terbangun dengan baik di Indonesia. Meski sebagian besar masyarakatnya melek media sosial, tetapi keahlian menulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar masih terbilang kurang. Bahkan ada anekdot, jika ada seseorang yang dimasukkan ke unit kerja yang bertugas melakukan penelitian dan pengembangan,

justru dimaknai bakal sulit berkembang. “Jadi kalau ada pegawai yang dimasukkan *research and development* artinya itu dibuang,” tutur dosen dengan *Hirsch Index Scopus* 18 itu menyayangkan label tersebut. Padahal di negara maju Litbang berisi pemikir masa depan. Di perusahaan, Litbang diandalkan untuk menghasilkan dan mengembangkan produk masa depan.

Sebagai upaya meningkatkan penelitian di Indonesia, pemerintah melakukan berbagai upaya. Salah satunya menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi di Amerika Mas-

“**ADA ANEKDOT, JIKA SESEORANG YANG DIMASUKKAN KE UNIT KERJA YANG BERTUGAS MELAKUKAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, JUSTRU DIMAKNAI BAKAL SULIT BERKEMBANG. PADAHAL DI NEGARA MAJU LITBANG BERISI PEMIKIR MASA DEPAN. DI PERUSAHAAN, LITBANG DIANDALKAN UNTUK MENGHASILKAN DAN MENGEMBANGKAN PRODUK MASA DEPAN.**

sachusetts Institute of Technology (MIT). Kerja sama itu melibatkan sejumlah dosen yang berasal dari perwakilan kampus di beberapa daerah salah satunya ITS. Riyanarto menjadi salah satu bagian dalam program kerja sama tersebut. Menurutnya, langkah itu tepat dilakukan melihat MIT merupakan kampus rujukan untuk mengembangkan penelitian. Hal ini ditandai dengan berhasilnya kerja sama yang dilakukan salah satu kampus di Singapura dengan MIT.

Sebagai pengajar yang perhatian terhadap dunia penelitian, ia juga kerap menekankan kepada mahasiswanya bahwa kuliah tak hanya mencari gelar atau ijazah. Hal yang lebih penting adalah menempa kompetensi, salah satunya di bidang penelitian. Untuk mengajarkan mahasiswa piawai dalam hal itu, dirinya kerap mengajarkan teknik menulis yang baik dan benar. Ia mendorong agar mahasiswa melakukan penelitian dan memiliki publikasi ilmiah. Dirinya juga tak segan mengajak peserta didiknya untuk berkolaborasi meneliti. Riyanarto menuturkan, tak sedikit mahasiswanya yang kini memiliki keahlian riset yang andal. Bahkan, beberapa di antaranya mendapat kesempatan untuk melakukan kolaborasi riset dengan negara luar.

Hilirisasi

Riyanarto menyebutkan, penelitian memiliki sembilan tingkatan yang dinamai kesiapterapan teknologi. Penelitian tingkat satu sampai tiga lebih mengedepankan pada upaya mengembangkan ilmu dasar. Sedangkan tingkat empat sampai enam merupakan fase penerapan dari temuan yang dilakukan sebelumnya. Kemudian beranjak ke tingkat tujuh sampai sembilan, yakni menghilirkan produk yang dihasilkan. Karena itu, ia menekankan penelitian tak hanya berhenti pada publikasi ilmiah. “Lebih lanjut harus mempunyai inovasi, menjadi sesuatu yang bisa diaplikasikan dan bernilai ekonomis,” tuturnya.

Sebagai seorang dosen yang mampu keilmuan teknologi informasi, Riyanarto sudah banyak menghasilkan karya penelitian yang berhasil diterapkannya. Salah satunya adalah aplikasi teknologi *mixed reality* atau *virtual reality* berbasis kecerdasan buatan di bidang kesehatan. Alat yang dinamai *BAMAG (brain anatomy morphology generator)* itu, salah satunya berfungsi menuntun tindakan bedah otak pada pasien parkinson.

BAMAG berfungsi menganalisa letak



saraf yang bermasalah pada pasien parkinson sebelum tindakan operasi bedah dilakukan. Melalui penggabungan MRI (*magnetic resonance imaging*), MRA (*magnetic resonance angiography*), dan CT (*computerized tomography*) scan diwujudkan dalam bentuk tiga dimensi. Dengan cara ini pengukuran letak kelainan dalam otak yang akan dioperasi lebih presisi, sehingga perencanaan tindakan lebih matang. Dengan demikian, dokter dapat melakukan tindakan secara tepat dan cermat. Saat ini alat tersebut sudah diaplikasikan di RSUD dr Soetomo Surabaya. Selain parkinson, alat ini juga dapat menangani penyakit saraf otak lainnya.

Selama ini, kata Riyanarto, alat serupa itu masih didatangkan dari negara luar dengan harga tinggi sekira Rp 11 miliar. Dengan nominal itu banyak rumah sakit di Indonesia tak mampu membelinya. Melalui kerja sama dengan industri, alat ini bakal diproduksi secara massal dengan harga yang jauh lebih murah, sekira sepertiga dari harga impor. Dibanding produk impor, Riyanarto meyakini jika kualitas produknya lebih baik. "Di Indonesia ini kita sangat membutuhkan peralatan-peralatan

inovasi di dalam dunia kesehatan, hampir peralatan kita ini impor," ujarnya.

Alat yang diciptakannya juga dapat dimanfaatkan sebagai simulator bagi dokter yang hendak belajar mengoperasikan. Dulu praktik seperti itu banyak menggunakan mayat yang menurutnya memiliki sejumlah kekurangan, seperti harganya mahal, langka, dan hanya sekali pakai. Dengan alat *virtual reality* yang diciptakannya, dokter dapat belajar mengoperasikan berkali-kali. Alatnya juga dilengkapi dengan sistem penilaian yang bergantung pada tingkat keberhasilan tindakan simulasi operasi yang dilakukan. "Jadi dokter kalau gagal skornya kurang, kalau berhasil skornya tinggi," katanya.

Teknologi itu tercipta atas buah dari keuletannya dalam mengembangkan hasil penelitian sesuai dengan sembilan tingkatan kesiapterapan teknologi, dari mulai belajar, eksperimen, menulis artikel, sampai dikenal banyak orang dan berkolaborasi dengan pihak di dalam maupun luar negeri.

Selain aplikasi di bidang kesehatan, Riyanarto juga membuat aplikasi di urusan lainnya, seperti misalnya di

dunia usaha. Ia sempat membuat aplikasi yang diperuntukan bagi usaha retail, yang ia terapkan kepada pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di daerah Surabaya dan sekitarnya. Aplikasi itu dapat mengelola keuangan, persediaan logistik, dan menentukan distributor produk yang baik. Dengan memanfaatkan alat ini, para pelaku UMKM dapat mengoptimalkan pendapatannya. "Mereka UMKM bisa menggunakannya *free* (gratis) *online* servernya di ITS," tuturnya.

Selain itu, ia bersama timnya juga membuat terobosan dengan merancang sistem pemilihan elektronik (*e-vote*), yang digunakan saat proses pemilihan rektor ITS pada awal 2019. Langkah itu dilakukan dengan membangun *single identity number* terlebih dulu melalui pemanfaatan nomor induk pegawai (NIP) para dosen. Upaya itu disertai menertibkan alamat surat elektronik. Sistem itu juga dibangun dengan keamanan yang andal. Hal tersebut diperlukan untuk menghindari kemungkinan dosen memilih lebih dari sekali. "Alhamdulillah bisa diaplikasikan, hasilnya rektor yang sekarang ini," tuturnya.

■ MUJAENI

Sekjen Kemendagri Minta Pemda Perhatikan Urusan Pemerintahan Sesuai Amanat UU Pemda

JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hadi Prabowo meminta Pemerintah Daerah (Pemda) memperhatikan Urusan Pemerintahan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal itu diungkapkannya dalam Rapat Penyerahan Petunjuk Teknis Kegiatan Dekonsentrasi Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Pernyataan tersebut disampaikan saat ia mengisi acara di Golden Boutique Hotel Jl. Angkasa No. 1 Gunung Sahari, Jakarta, Rabu (12/02/2020).

"Kami mengingatkan kembali terkait dengan sistem tata pemerintahan Indonesia, telah ditegaskan pengaturan terkait penyelenggaraan pemerintahan di daerah didasarkan pada UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itulah upaya yang dilakukan adalah merupakan pengaturan bagaimana penyelenggaraan pemerintahan dapat dilaksanakan secara efisien, efektif dan memperpendek jarak atau rentang kendali kewenangan," kata Hadi.

Berdasarkan UU Pemda tersebut, disebutkan urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Sementara urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

"Jadi 3 aspek pemerintahan inilah benar-benar harus dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan baik nasional maupun daerah, disesuaikan dengan yang menjadi kewenangannya masing-masing, karena semuanya sudah diatur dalam UU," ujarnya.

Hadi juga menyampaikan, penyelenggaraan urusan Pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Sehingga diharapkan para kepala daerah di tingkat provinsi atau gubernur dapat menjalankan tugasnya berdasarkan ketiga asas tersebut.

"Kemudian kita juga pahami bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan atas 3 (tiga) asas, (yakni) desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, sehingga dengan 3 (tiga) asas ini, Gubernur ini memiliki kedudukan ganda yakni baik selaku kepala daerah otonom, kepala daerah provinsi, dan wakil pemerintah pusat di daerah dalam



pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan," jelasnya.

Untuk itu, pemerintah mendorong asas penyelenggaraan tersebut dengan memberikan dana dekonsentrasi. Dana tersebut bersumber dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi.

"Untuk itulah harapan kita bersama dengan diberikan dana dekonsentrasi ini, gubernur dapat melaksanakan beberapa tugas sebagai wakil pemerintah pusat di daerah antara lain adalah menjaga keutuhan kesatuan sistem pemerintahan, menjaga keseimbangan dan harmonisasi hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, mewujudkan dan memastikan menjamin pelaksanaan otonomi daerah, kemudian penyelenggaraan pemerintahan secara efisien, efektif, dan melakukan pencegahan dan mengatasi terjadinya konflik atau perselisihan antar daerah di wilayah provinsi," terang Hadi.

Hadi juga berharap, dengan diterimanya petunjuk teknis dalam pengelolaan dana dekonsentrasi tersebut, dapat mewujudkan sinkronisasi, koordinasi, serta tepat sasaran dalam pelaksanaannya.

"Saya harapkan dengan diterimanya juknis (petunjuk teknis) ini Bapak/Ibu tentunya dapat segera mengambil langkah-langkah dalam membuat perencanaan, menyiapkan perangkat daerahnya dan tentunya memulai untuk pengaturan jadwal pelaksanaan, dan yang lebih khusus lagi adalah mewujudkan sinkronisasi dan juga koordinasi yang lebih efektif terkait dengan pelaksanaan tugas ini, dengan harapan agar kegiatan program ini dapat diwujudkan tertib administrasi dan tepat di dalam pencapaian program manfaat, serta sasarnya," pungkasnya.

■ KEMENDAGRI.GO.ID

Indonesia Bersaing Bangun Teknologi Alutsista

TEKNOLOGI pada bidang militer melesat dengan sangat pesat. Berbagai negara berlomba memperkuat militernya. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Indonesia pun bersaing untuk memperkuat alutsistanya. Belum lama ini, Indonesia memperkenalkan kapal selam baru dan pesawat tanpa awak pengintai.

KRI ALUGORO

Kapal selam Alugoro-405, menjadi bagian dari armada pertahanan dan pemukul di lautan yang akan digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL). Kapal selam Alugoro adalah kapal selam pertama yang dirakit di Indonesia hasil kerja sama dengan PT PAL dan Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd (DSME) asal Korea Selatan.

Alugoro diketahui memiliki kemampuan perang yang mumpuni. Dilengkapi senjata torpedo *black shark* generasi terbaru buatan Whitehead Alenia Sistemi Subacquei (WASS), anak perusahaan dari Leonardo-Finmeccanica SpA asal Italia yang beroperasi dalam pembangunan sistem senjata bawah air.

Selain torpedo *black shark*, kapal selam ini juga dilengkapi dengan sonar yang dapat mendeteksi musuh di permukaan dan bawah air. Dalam keterangan resmi perusahaan Leonardo-Finmeccanica SpA, torpedo *black shark* merupakan generasi terbaru torpedo kelas berat yang dapat dikendalikan. Secara operasional, torpedo multi target itu dirancang agar bisa diluncurkan dari kapal selam atau kapal permukaan.

Black shark yang didukung dengan baterai AL-AgO dapat meluncur sejauh 50 kilometer dengan kecepatan 50 knot. *Black shark* disebut beroperasi di kapal selam tipe 209, 214, 212, dan *scorpene*.

Karakter utama dari torpedo itu adalah tingkat kebisingannya yang sangat rendah sehingga sulit terdeteksi. Dilengkapi juga STANAG 4405; *Acoustic Counter-Counter-Measures (ACCM)*; hingga *Advanced Sonar Transmitting and Receiving Architecture (ASTRA)*.

Salah satu keunggulan lain adalah mampu menembus kedalaman laut hingga 250 meter. Pengembangan kapal selam ini mendapat dukungan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN)



sebesar Rp1,5 triliun yang dialokasikan pada APBN 2015. Pembangunan kapal selam KRI 405 Alugoro dimulai pada 6 April 2015. Pada 11 April 2019 berhasil diselesaikan di galangan kapal milik PT PAL.

PESAWAT TANPA AWAK

Elang Hitam adalah drone atau pesawat udara nirawak (PUNA) tipe *Medium Altitude Long Endurance (MALE)* yang mampu terbang tanpa henti selama lebih dari 24 jam.

Pesawat ini dikembangkan oleh Konsorsium Pesawat Terbang Tanpa Awak yang beranggotakan BPPT, Kementerian Pertahanan dan TNI Angkatan Udara sebagai pengguna, Institut Teknologi Bandung sebagai mitra perguruan tinggi, PTDI sebagai mitra industri pembuatan pesawat, PT LEN Persero yang mengembangkan sistem kendali dan muatan, serta Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

PUNA MALE digadang-gadang akan mendukung kemandirian alat utama sistem pertahanan negeri serta mendukung kegiatan intelijen, pengawasan, pengintaian dan penargetan. PUNA MALE Elang Hitam ini rencananya akan dipersenjatai rudal dan mampu terbang dengan ketinggian jelajah hingga 23.000 kaki

Pemantauan dilakukan dalam mengantisipasi ancaman yang terjadi di daerah perbatasan, serta kasus lain seperti terorisme, penyelundupan, pembajakan, hingga pencurian sumber daya alam di antaranya pembalakan liar dan pencurian ikan.

Elang Hitam memiliki spesifikasi di antaranya daya jelajah dan komunikasi hingga 250 km, durasi terbang terus menerus hingga 30 jam, dimensi panjang pesawat 8,3 m dan bentang sayap 16 m.

SAIDI RIFKY/DIOLAH DARI BERBAGAI SUMBER

Hubungan Yoghurt dengan Risiko Kanker Payudara

MENGONSUMSI yoghurt alami setiap hari dapat menurunkan risiko terkena kanker payudara bagi perempuan. Kesimpulan tersebut belum lama ini dipublikasikan dalam *Jurnal Medical Hypotheses*. Para peneliti dalam penelitian yang dimuat dalam jurnal itu mengatakan, salah satu penyebab kanker payudara kemungkinan adalah peradangan yang dipicu oleh bakteri berbahaya.

Para peneliti dalam artikelnya yang berjudul *Hypothesis: Bacterial Induced Inflammation Disrupts the Orderly Progression of the Stem Cell Hierarchy and has a Role in the Pathogenesis of Breast Cancer* tersebut, juga membuktikan hasil penelitiannya. Di antaranya, peradangan yang disebabkan oleh bakteri memiliki keterkaitan dengan kanker. Yoghurt disebutkan mengandung bakteri pengfermentasi laktosa bermanfaat yang biasa ditemukan dalam susu, bakteri baik itu mirip seperti bakteri atau mikroflora yang ditemukan saat proses laktasi oleh ibu menyusui.

Para peneliti yang terlibat seperti Marwaha, Morris, dan Rigby, masing-masing berasal dari institusi *Biomedical and Life Sciences, Faculty of Health and Medicine, Lancaster University, dan University Hospitals of Morecambe Bay NHS Trust* tersebut menyebut, bakteri fermentasi laktosa yang ada saat proses laktasi oleh ibu menyusui dapat mengurangi risiko kanker payudara sebesar 4,3%.

"Keterkaitan konsumsi yoghurt dengan penurunan risiko kanker payudara disebabkan oleh perpindahan bakteri berbahaya oleh bakteri baik yang bermanfaat dalam yogurt," disebutkan dalam artikel tersebut.

Menurut mereka, ada sekitar 10 miliar sel bakteri dalam tubuh manusia dan sebagian besar tidak berbahaya, namun beberapa

bakteri menciptakan racun yang memicu peradangan dalam tubuh.

Peradangan adalah respon tubuh terhadap suatu bahaya, seperti stres, infeksi organisme asing (seperti bakteri dan virus), serta bahan kimia beracun. Namun, peradangan yang terjadi dalam waktu yang lama dapat merusak tubuh. Peradangan bisa berubah menjadi kronis (menetap lama) ketika tubuh tidak dapat menghilangkan penyebab inflamasi, terpapar penyebab peradangan secara terus-menerus, dan juga bentuk respon autoimun di mana sistem imun menyerang jaringan yang sehat. Penyakit yang sering berkaitan dengan peradangan kronis diantaranya jantung (miokarditis), ginjal (nefritis), peradangan usus, peradangan sendi, peradangan tulang, peradangan pada kulit, peradangan pada gusi, atau bahkan juga kanker payudara.

Para peneliti menyimpulkan, sel-sel induk yang membelah untuk mengisi lapisan saluran payudara dipengaruhi oleh mikroflora. Komponen tertentu dari mikroflora itu telah ditunjukkan pada orang lain, seperti usus dan lambung, untuk meningkatkan risiko perkembangan kanker.

"Karena itu, skenario serupa ada kemungkinan akan terjadi pada payudara, di mana dampak mikroflora pada pembelahan sel induk akan mempengaruhi risiko kanker," kata Rigby.

Dalam artikel tersebut para peneliti secara tegas menyatakan, laporan penelitiannya adalah netral tidak karena sebuah kepentingan atau hubungan pribadi dengan seseorang.

SAIDI RIFKY/DIOLAH DARI BERBAGAI SUMBER



Petuah Purba Stoa untuk Para Pemikir Kiwari

KIWARI Nusantara menyajikan tontonan kejiwaan yang menyimpang dari fragmen hidup orang-orang Indon. Bahkan, para pemikir dan pemangku adab sekelas negara pun sinis melakoni kiwari. Tak sedikit intelektual berlagak sinting. Klimaksnya, mereka tersesat memperoleh jalan keutamaan hidup. Gagal mensyukuri diri sebagai identitas manusia waras. Karakter jatmika sengaja digadaikan demi hasrat dan asa abal-abal.

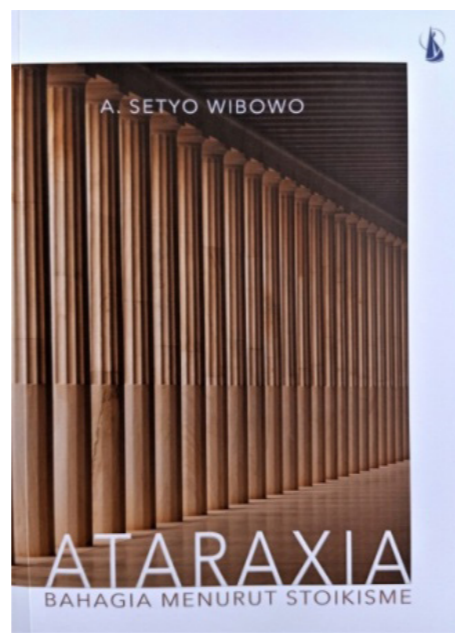
Utopia nyata-nyata diberhalai. Tengoklah, pesona arketipe kerajaan kuno (ala “Keraton Agung Sejagat”-Purworejo dan “Sunda Empire”-Bandung) hingga berhala uang (ala “King of The King”-Banten) dan dengus “Kerajaan Mula-warman”-Kutai Kartanegara) adalah fenomena matinya nalar atau rasio semesta. Kiwari tak sekadar berarti mazhab modern, mutakhir, kontemporer, ataupun kontekstual. Kiwari menjadi bukti dini tentang sinisme zaman digitalisasi, supervisi, 4.0, ataupun intipan 5.0 yang naga-naganya menjungkirbalikkan pendewaan logika matematika.

Kiwari membuncahkan sinisme purba (filsafat klasik Yunani-Romawi kuno) untuk bangkit kembali. Coleklah pesohor purba Epictetus, Marcus Aurelius, Seneca yang berjaya 2000 tahun silam. Tak segan-segan, kiwari gencar meneroka kitab-kitab lawas kejiwaan CG Jung, S Freud, pun F Nietzsche guna membu-

ka tabir “halu” tabiat manusia terkini. Betapa tergopoh mencerna buku anggitan A.Setyo Wibowo ini! Namun, titis sebagai kritik *santuy* untuk para intelektual kiwari. Apa yang hendak mereka cari dan pertaruhkan dalam hidup ini?

Kuasa, nafsu, dan uangkah? Ketiganya bisa ditaklukkan “bahagia” ala Stoikisme. Setyo Wibowo mengusung jampi pikiran loyo untuk para pemikir Indonesia. Setyo yakin bahwa Stoikisme mampu mengendalikan kesehatan jiwa akibat luka-luka keserakahan kuasa-nafsu-uang yang membuat emosi labil. Sekadar contoh, terjadilah pertarungan fakta versus opini setiap orang. Jika ada yang menabur opini di fb, ig, twitter, atau grup WA yang cocok kesukaan, puaslah hajatnya. Efek jahatnya mulailah membuli kubu lawan. Sebaliknya, jika hp dipenuhi opini kubu lawan, geganalah (gelisah-galau-merana) jadinya. Emosi dan pikiran dijungkir balik secara ekstrem dan mengancam kesehatan jiwa.

Buku *Ataraxia* (2019) ini masihlah dianggap pintu gerbang mula untuk meraih bahagia sebagai inti keutamaan hidup. Ada tiga bab besar, yakni Stoikisme yang ikrar diri bahwa ajaran atau petuahannya sebagai laku hidup. Bab berikutnya, Stoikisme sebagai praktik hidup (askesis) yang mewajibkan latihan-latihan kontinu. Epiktetus sebagai pesohor askesis, dilahirkan sebagai budak tahun 50-130 M, besar dalam kuasa kekaisaran Nero di Roma. Bab terakhir, Stoi-



Ataraxia, Bahagia Menurut Stoikisme

Penulis : A Setyo Wibowo

Penerbit : Kanisius

Cetak : 2019

Tebal : xvi + 208 halaman

ISBN : 978-979-21-5769-7

Harga : Rp70.000

kisme diterapkan dalam pusaran kuasa kaisar atau politik negara. Tahun 121-180 M, Kaisar Marcus Aurelius menjadi pesohor integritas penguasa.

Secara mendasar Stoikisme memandu kita untuk memilah dan membedakan fakta dan opini rasional. Stoikisme menunjukkan bahwa penyebab gegana, marah, iri, sedih, dan emosi negatif adalah akibat opini (sama sekali bukan akibat fakta tertentu). Kesalahan menilai mengakibatkan segala emosi lekas naik pitam.

Stoikisme mengusung definisi emosi negatif (nafsu) sebagai cara berpikir rasional, tetapi keliru. Definisi ini menarik karena orang yang terkena emosi negatif (sedih, iri, takut, marah) ternyata orang yang rasional. Oleh karena itu, orang yang ketakutan biasanya memiliki argumen rasional. Emosi negatif tidak bisa begitu saja ditundukkan, karena emosi tersebut bukan sesuatu yang irasional (lemah) (hlm. 172).

Justru Stoikisme menawarkan *ataraxia* (*absence of troubles*) atau *apatheia* yang artinya situasi jika seseorang telah kebal terhadap emosi-emosi negatif. *Ataraxia* bukan berarti orang tidak memiliki emosi-emosi positif. Stoikisme memberi definisi yang khas untuk tiga emosi positif yang dimiliki oleh orang yang mampu menekuk emosi negatifnya. 1) Emosi positif merasa gembira (*chara*) adalah dorongan hati yang bisa dikendalikan hasil dari opini tepat mengenai hal yang dianggap baik di masa sekarang (*present good*). 2) Emosi positif sikap teguh berpengharapan (*boulesis*) adalah impuls yang bisa dikendalikan hasil dari opini tepat mengenai hal yang dianggap baik di masa depan (*future good*). 3) Emosi positif sikap waspada (*eulabeia*) adalah rangsangan yang bisa dikendalikan hasil dari opini tepat mengenai hal yang dianggap buruk di masa depan (*future evil*).

Sebagai memo penting, untuk rangsangan yang bisa dikendalikan hasil dari opini tepat mengenai hal yang dianggap buruk (*present evil*) saat ini tidak ada! Mengapa? Karena bagi orang yang berkeutamaan, saat ini tidak ada yang buruk. Tidak ada yang buruk bagi seorang Stoik. Jika saat ini “aku” menganggap sesuatu sebagai keburukan, ini berarti “aku” tidak berkeutamaan, “aku” belum Stoik! (hlm. 175)

Semakin yakin Setyo Wibowo merekomendasikan Stoikisme adalah ajaran filsafat (sebagai laku hidup) yang menawarkan terapi jiwa. Ajarannya unik karena wajib melatih praktik-praktik harian. Sinismenya, filsafat dikebiri sebagai ilmu sok pintar bicara untuk *minteri* (menipu) orang. Stoikisme simpel: “Jangan sok berlagak filsuf. Jika kamu mau membuktikan pernah belajar filsafat, tunjukkanlah lewat laku hidupmu”.

Belajar filsafat bisa diumpamakan seperti sapi yang makan rumput. Sapi yang baik tidak mengembalikan rumput kepada penggembalanya, tetapi membawa daging dan susu hasil pencernaan dan pengolahannya atas rumput yang selama ini diberikan. Nah, filsuf yang Stoik tidak memuntahkan lagi ajaran-ajaran yang ia hafal dan cerna, tetapi justru menunjukkan laku utama lewat hidupnya (hlm. xi).

Stoikisme menjanjikan kebahagiaan. Jika Anda menerapkan teori-teorinya dalam praktik keseharian, dijaminlah bisa mendapatkan kebahagiaan dalam arti “negatif”. Bahagia bagi kaum Stoik berarti *absence of troubles* (bahasa Yunani *apatheia* atau *ataraxia*). Saat Anda terbebaskan dari luka penyakit jiwa (emosi negatif: rasa pahit, menderita, iri hati, marah, dan takut) maka Anda bahagia.

Setyo Wibowo tetap *santuy* mengingatkan mungkin bagi beberapa dari Anda, kebahagiaan negatif seperti itu kurang tinggi. Mungkin Anda punya

aspirasi lebih hebat lagi. Akan tetapi, Stoikisme membatasi harapan kebahagiaanannya cuma pada situasi ketika batin tidak terganggu oleh berbagai emosi jelek. Meskipun sumir, untuk meraihnya butuh perjuangan dan latihan (askesis) terus-menerus. Cobalah!

Memang dengan berjalannya waktu, tidak ada pilihan yang bersifat eksklusif. Orang akan cenderung mencampurbaurkan unsur-unsur yang dianggap berguna baginya. Dalam tradisi filsafat klasik, ada harmoni dengan aspirasi masing-masing. Orang bisa memilih apakah ia ingin hidup menurut Sokratisme, Platonisme, Aristotelisme, Epikurisme, Stoikisme, Sinisme, atau Skeptisisme. Epikurisme dan Stoikisme, misalnya, mewakili dua hal yang saling bertentangan dalam diri kita. Keduanya praktis tidak bisa dipisahkan dari kehidupan batin, yaitu kesadaran moral yang sangat kuat (ide Stoik) dan keinginan untuk sepenuhnya bergembira dalam eksistensi saat ini (ide Epikurian) (hlm. 33). Di sinilah titik nyinyir petuah purba itu hingga menghantam mentalitas para juru pikir kiwari.

Sebagai epilog, buku *Ataraxia* (Kanisius, 2019) ini terbaca teoretis jika disinergikan dengan buku serupa, yakni *Filosofi Teras, Filsafat Yunani-Romawi Kuno untuk Mental Tangguh Masa Kini* anggitan Henry Manampiring (Kompas, 2019). Ibaratnya, *ataraxia* menjadi landasan teori dan pisau bedah analisis untuk problema dan ide besar yang dipaparkan dalam filosofi teras. *Ataraxia* memiliki 3 bab gemuk (208 hlm) dan *Filosofi Teras* memiliki 12 bab plus epilog (320 hlm). Pinangan mesra terbukti bahwa Dr. A. Setyo Wibowo membuat prolog buku Henry Manampiring berdasarkan resume (12 hlm) atas buku *Ataraxia*. Dua buku langka ini benar-benar menantang nyali dan mental para intelektual, para pemikir kiwari Nusantara.*

*ANTON SUPARYANTA, Alumni FIB UGM, kontributor naskah tentang pendidikan-seni-budaya-sastra di beberapa harian pagi (Jawa Pos, Koran Jakarta, Lampung Post, Riau Pos, Solopos, Suara Merdeka, Radar Madura, Kabar Madura, KR, Minggu Pagi, buletin rohani, majalah INSPIRASI KAS Semarang, majalah Pewara Dinamika UNY), jurnal daring BASABASI.CO, portal sastra LITERA.CO.ID, majalah sastra SIMALABA.COM, dan majalah NEOKULTUR.



1917

Sutradara:

Sam Mendes

Pemain:

George MacKay,

Dean-Charles Chapman,

Mark Strong,

Andrew Scott,

Richard Madden,

DLL

Produksi:

DreamWorks Pictures

New Republic Pictures

Reliance Entertainment

Neal Street Productions

Amblin Partners

Tayang:

25 Desember 2019

(Amerika Serikat)



Berasa di Perang Dunia-1

BERCERITA tentang perang dunia pertama 1917, Intelijen Inggris telah mengetahui Jerman sedang melakukan upaya pengebakan. Mereka menarik pasukan, berpura-pura mundur dan menyerang balik pasukan Inggris dengan sekali gencatan senjata. Karena jaringan telepon bermasalah, Jenderal Erinmore (Colin Firth) tidak dapat memberi tahu berita ini ke Batalion-2 Resimen Devonshire di bawah pimpinan Kolonel Mackenzie (Benedict Cumberbatch). Dalam memecahkan masalah ini, Jenderal Erinmore mengutus dua prajuritnya William Schofield (George MacKay) dan Tom Blake (Charles Chapman) mengirimkan pesan penting kepada Kolonel Mackenzie untuk membatalkan serangan. Jika pesan ini gagal disampaikan sebelum fajar tiba, maka 1600 tentara Inggris akan gugur termasuk saudara Blake, Joseph Blake (Richard Madden). Untuk mengantar

pesan penting ini, Schofield dan Blake harus berburu waktu selama sehari semalam menempuh belasan kilometer melewati area terlarang yang dihuni tentara Jerman. Apakah Schofield dan Blake berhasil menjalankan misi ini?

Film ini dipuja-puja lantaran memenangkan 2 piala *Golden Globes* sekaligus menyabet 10 nominasi *Academy Awards*. "1917" juga digadang-gadang akan memenangkan Piala *Oscar* 2020. Film yang disutradarai oleh Sam Mendes ini menghabiskan waktu selama 65 hari untuk persiapan. Dibantu oleh Thomas Newman sebagai Komposer *Scoring*, sinematografer Roger Deakins, dan Dennis Gassner dalam desainer produksi, Mendes mampu menciptakan karya film yang menawan. Sebelumnya, Mendes telah menciptakan karya terkenal seperti *American Beauty*, *Skyfall*, dan *Spectre*.

1917 diilhami hari kisah nyata kakek sang sutradara, Alfred Mendes. Sam

Mendes mengulik cerita kakeknya yang ikut bergabung sebagai tentara Inggris saat perang dunia pertama. Tahun 1917, Alfred Mendes mengirim pesan ke berbagai pos batalion tanpa tahu, daerah yang dilaluinya merupakan daerah kekuasaan musuh.

Dari awal film ini diputar, penonton langsung diajak mengikuti perjalanan Schofield dan Blake yang penuh dengan rintangan. Tiap adegan yang dipertontonkan selalu mendebarkan dan menakutkan. Detail adegannya membuat penonton larut dan ikut merasakan menjadi bagian dari tokoh utama. Mendes memilih teknik *one take one shot* dalam pengambilan gambarnya. Pilihan sulit ini ditempuh sang sutradara untuk menciptakan pengalaman menonton yang berbeda dari kebanyakan film. Kamera seperti mata penonton, ketika kamera ada di belakang Schofield dan Blake yang sedang berlari, seolah penonton sedang dalam posisi yang sama dan ikut berlari dibelakang mereka.

Inilah kelebihan *one-shot* yang diterapkan Mendes.

Penggunaan teknik *one take one shot* dipadukan dengan editing yang halus membuat adegan terasa terus tersambung tanpa *cut*, padahal ini hanya tipuan. Dalam teknik ini, tetap ada *cutting* di setiap adegannya. Agar penggabungan semua *scene* terlihat tidak dipotong, Mendes harus mengulang adegan dan memastikan semua keadaan sama persis dengan adegan sebelumnya. Mulai dari gerakan tokoh, letak barang, sampai keadaan cuaca untuk mendukung lighting. Sebagai contoh, adegan terlama saja dilakukan 9 menit tanpa *cut*, keren bukan?

Pengalaman *real time* akan langsung dirasakan penonton saat menyaksikan film ini, mulai dari perasaan senang, panik, takut, lelah, putus asa, dan sedih sama persis dengan keadaan karakter utama.

Mendes membeberkan, film ini adalah garapannya yang paling su-

lit sepanjang ia menjadi sutradara. Banyak kesalahan di tiap *scene* yang membuat adegan terus diulang, apalagi dengan teknik pengambilan gambar *one-shot*. Salah adegan satu aktor saja harus mengulang adegan semua actor yang terlibat. Di film ini, teknik *CGI (Computer-Generated Imagery)* juga tidak terlalu banyak digunakan, Mendes benar-benar mencari ratusan pria untuk menjadi figuran tentara. Sinematografi yang dibawakan juga sangat elegan, grafis yang ditampilkan menggambarkan suasana mencekam perang dunia pertama yang sesungguhnya. Apalagi saat sang aktor sedang kejar-kejaran dengan tentara Jerman di puing-puing bangunan. Sungguh, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata! Luar biasa menakjubkan.

Film 1917 menyisipkan banyak makna mengenai kemanusiaan. Perang sama sekali tidak ada gunanya, saling menyakiti, membantai, membunuh, sia-sia, dan hanya saling merugikan.

■ FARIDA UBAY

Dari Pilpres Kemarin Ke Pilkada Masa Lalu

Hari Taqwan Santoso*

MEN-
JELANG
pilpres
tahun lalu
Facebook

dibanjiri oleh serangkaian perdebatan panas. Dalam hal ini warganet terbagi menjadi dua kubu, yang masing-masing merasa mantap dengan calon yang mereka dukung. Hanya sedikit di antara serangkaian perdebatan itu yang bermutu, sisanya sampah belaka. Akar masalahnya, tentu saja, adalah pola pikir kebanyakan warganet yang berbentuk: "capres saya baik dan layak menang, dan oleh karena itu capres lawan adalah orang jahat yang tidak akan becus dalam mengelola negara seandainya nanti dia yang menang".

Pola pikir "kelompok saya baik, maka lawan pastilah jahat" seperti inilah yang menimbulkan kefanatikan di kedua kubu. Sebagian besar warganet mendasarkan argumen-argumennya di atas kerangka pikir seperti ini sehingga perdebatan-perdebatan yang tercipta bukan dialektika yang sehat melainkan, sekali lagi, sampah belaka. Sialnya lagi, kerangka pikir ini tidak hanya menjangkiti sekadar orang kurang terdidik yang mempunyai akun di Facebook, tetapi juga para cendekiawan yang telah menghabiskan bertahun-tahun hidupnya di masa lalu untuk belajar logika dan metode ilmiah. Keduanya adalah alat paling ampuh kita saat ini untuk menyingkap setiap tabir yang menutupi kebenaran apa pun di dunia ini, tidak terkecuali kebenaran dalam bidang politik. Dan untuk suatu alasan yang tidak bisa saya pahami, para cendekiawan itu meninggalkan keduanya demi dukungan fanatik yang mereka lakukan pada capres mereka, di kedua kubu.



Waktu pilpres tahun lalu, saya mendukung salah satu capres karena menurut saya tidaklah tepat bagi seorang warga negara untuk menjadi golput. Saya pun andil dalam perdebatan-perdebatan di Facebook dengan sejumlah upaya untuk mengarahkan perdebatan-perdebatan itu tetap berada di atas jalan dialektis

yang sehat. Saya menetapkan beberapa batasan untuk diri saya sendiri. Pertama, dan yang paling jelas, saya tidak akan pernah meninggalkan kedua alat penting yang telah saya sebutkan sebelumnya. Kedua, saya tidak akan berlaku fanatik. Artinya, kesalahan atau kekurangan yang ada dalam kelompok yang saya bela harus saya akui, jika memang itu terbukti benar, dan juga kebenaran atau kelebihan yang ada pada kelompok lawan juga harus saya akui jika memang itu terbukti benar. Ketiga, argumen apa pun yang lolos dari skeptisme ilmiah, betapa pun itu tidak menguntungkan bagi kelompok yang saya bela, atau justru menguntungkan kelompok lawan, atau kedua-duanya, akan saya terima dengan lapang dada.

Barangkali akan dikira bahwa dengan adanya berbagai batasan tersebut, seseorang akan susah memenangkan perdebatan, padahal sebenarnya tidak begitu juga. Jika lawan Anda tidak menggunakan prinsip-prinsip logika yang ketat, sebenarnya mudah untuk membalik perdebatan yang bersangkutan ke arah yang menguntungkan Anda. Misalnya, salah seorang cendekiawan yang saya bicarakan tadi, di kubu seberang, menjelang Hari-H pemilu serentak itu, sering sekali membagikan berita yang dia ambil dari internet untuk menyerang capres yang saya

dukung. Masalahnya dia melakukan itu secara asal-asalan, tanpa mengecek kebenaran berita itu. Saya bahkan ragu dia membaca isinya sampai habis. Sepertinya, dia hanya membagikan berita itu karena judulnya yang sangat memrovokasi. Itulah celah yang saya manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saya menanggapi dengan mempertanyakan kesesuaian antara judul berita yang dia bagikan dengan isinya, lalu kebenaran berita itu, mengingat banyaknya hoax yang bertebaran di internet. Dari situ saya terus mengejar dan seringkali dia kewalahan dan memilih untuk tidak menanggapi lebih jauh. Meskipun, dalam beberapa kesempatan juga dia dapat menyampaikan argumen yang runtut dan bagus sehingga saya tidak bisa membantahnya karena kekurangan informasi.

Di satu sisi, ini ternyata sangat mengasyikkan. Bagaimanapun, saya adalah orang yang suka melakukan perdebatan, asalkan itu sehat dan topik yang dibicarakan berbobot meski sedang tidak hangat. Dan saya berusaha untuk tidak terbawa emosi atau menyimpan dendam, kapan pun saya mengalami kekalahan dalam beradu argumen. Bagi saya, perdebatan yang sehat adalah sebuah upaya untuk menambah wawasan, melatih ketangkasan intelektual dan juga melatih kesabaran. Di sisi lain, tanpa saya sadari ini ternyata sangat menyita waktu. Seminggu menjelang pilpres, dari kota tempat saya tinggal sampai ke desa tempat saya berasal, mata saya terus terpaku ke layar *smartphone* sepanjang hari (saya bekerja di sebuah kota yang tidak jauh dari tempat saya berasal, dan memilih untuk pulang kampung demi pemilu serentak untuk menghindari birokrasi yang bertele-tele di "tanah rantau").

Sehari sebelum pemilu serentak, saya masih asyik dengan perdebatan melalui *Facebook*. Dari pagi sampai menjelang tengah hari, saya duduk di ruang tengah dengan jari yang nyaris tidak pernah berhenti memencet layar *smartphone*. Tiba-tiba ayah saya yang baru pulang dari sawah, masuk melalui pintu utama. Melihat saya, dia menggelengkan kepala, meletakkan cangkulnya di dekat pintu, capingnya di atas gagang cangkul itu lalu duduk di seberang saya. Kami terpisah oleh meja kayu buatan kakek buyut saya. Bapak pun menegur, "Kamu itu *Iho Le*, dari kemarin *hp* terus. Sambil senyum-senyum kayak orang kurang kewarasan."

"Saya sedang berdebat Pak. Soal presiden. Seru ini! *Hehe*."

Bapak menghembuskan nafas panjang sambil menggeleng lebih banyak lagi. Lalu dia melongok ke pintu yang

menghubungkan ruang tengah tempat kami duduk-duduk itu dengan ruang belakang, menganggap ibu saya ada di sana serta siap untuk disuruh. Bapak lalu berteriak, "Buneee... Kopi duaaa... Satu buatku, satu buat anakmu yang gila *hp* ini!"

Saya pun meletakkan *smartphone*-ku dan berpaling pada bapak yang mengeluarkan kertas rokok, tembakau, potongan cengkeh dari kantong kulit biawaknya dan mulai *melinting*. "Coba, lihat *hp*-mu," pintanya setelah mengepulkan asap ke udara.

Kuserahkan *smartphone*-ku yang layarnya masih menampilkan seluruh perdebatan di *Facebook* itu. Bapak membacanya penuh perhatian, manggut-manggut langsung paham lalu bergumam, "Zaman sudah berubah, generasi berganti, tapi untuk masalah-masalah seperti ini mental orang-orang masih tetap sama."

"Maksud Bapak?"

"Iya. Perseteruan antar pendukung itu tidak hanya terjadi sekarang-sekarang saja. Dulu juga sudah ada kejadian seperti itu."

"Saya kok masih belum paham. Maksudnya dulu ada debat presiden juga, begitu?"

"Bukan. Dulu presiden kan tidak dipilih langsung oleh rakyat, lagi-pula presidennya hanya itu-itu saja. Maksudku adalah, bahwa kampanye hitam, menebar berita palsu, perseteruan antar pendukung, mereka sudah ada dari dulu. Hanya saja dulu cakupannya jauh lebih sempit, yang menjadi bahan perseteruan bukan presiden tapi

Lurah atau Kepala Desa. Meski hanya pilkades, panasnya mungkin bisa lebih hebat dari panas pilpres sekarang. Sekarang kamu bisa berdebat lewat *hp*. Dulu tidak ada. Tatap muka langsung."

Dan tanpa aba-aba, Bapak pun mulai bercerita.

"Tahun 1987, Pak Jaenuri yang maju sebagai calon lurah menebar berita ke warga desa kita, kalau istri Pak Saleh, calon lurah tandingannya, adalah keturunan anggota partai terlarang. Waktu itu cap 'keturunan anggota partai terlarang' masih sangat ampuh untuk merusak nama baik seseorang. Kebetulan, istri Pak Saleh berasal dari daerah lain yang agak jauh dari sini, dan di daerah itu memang banyak anggotanya. Sehingga warga jauh lebih mudah percaya daripada mengecek kebenarannya secara langsung. Akibatnya, para pendukung kedua calon itu saling memusuhi, dari sekadar tidak bertegur sapa di jalan sampai hampir

“
BAHWA KAMPANYE HITAM,
MENEBAR BERITA PALSU,
PERSETERUAN ANTAR
PENDUKUNG, MEREKA SUDAH
ADA DARI DULU. HANYA SAJA
DULU CAKUPANNYA JAUH
LEBIH SEMPIT.”

tawuran di warung kopi. Untuk meredam kekacauan yang semakin menjadi, Pak Saleh pun mengundurkan diri.”

“Tahun 1997, giliran Pak Nur dan Pak Gozali yang bersaing memperebutkan kursi kepala desa. Pak Nur tinggal di sebelah utara desa, karena itu para pendukungnya kebanyakan berasal dari sebelah utara desa. Sementara Pak Gozali yang tinggal di sebelah selatan, didukung oleh para penduduk di sebelah selatan desa. Warga kembali terpecah menjadi dua. Keadaan sudah tidak sepanas sepuluh tahun sebelumnya karena kampanye hitam sudah tidak ada lagi. Tapi banyak warga yang kemudian menjadi lebih cerdas, atau tepatnya licik, dalam memanfaatkan situasi. Mereka mendaftar sebagai timses ke salah satu calon lurah, tapi diam-diam juga turut menjadi timses di kelompok lawan. Tujuannya supaya mendapat uang dari keduanya.”

“Sebentar,” saya menyela. “Tahun 1997, saya masih terbilang kecil, tapi sudah cukup paham dengan keadaan. Saya tahu bapak menjadi timses untuk Pak Gozali, bukan?”

“Betul. Bapak dan Pak Gozali itu masih kerabat. Kakekku adalah kakak kandung nenek Pak Gozali. Lagipula kita ini kan warga selatan. Dan di kalangan warga, Bapak terbilang punya banyak pengaruh. Karena itu ketika utusan Pak Gozali meminta bapak menjadi timsesnya, Bapak langsung setuju.”

“Tapi yang kemudian menang kan Pak Nur, Pak?”

“Betul. Pak Nur menang dengan jujur. Dan Bapak mengakui kekalahan dengan mendatangi rumahnya untuk mengucapkan selamat. Banyak teman bapak yang mendukung Pak Gozali kecewa dengan tindakan ini. Bahkan ada yang menuduh Bapak sebagai pembelot atau penjiilat. Dan, waktu Bapak bertandang ke rumah Pak Nur, ternyata di sana sedang ada pesta perayaan kecil yang dihadiri oleh seluruh timsesnya. Bapak tenang saja.

Bapak menemui Pak Nur secara langsung, mengucapkan selamat dalam bahasa yang formal, lalu menutupnya dengan kalimat yang tidak pernah Bapak lupakan ini: ‘Maaf,

Pak Nur. Kemarin-kemarin saya sibuk menyusun agenda bersama teman-teman di selatan.

Oleh karena itu saya tidak bisa berkunjung kemari. Tapi berhubung sekarang Pak Nur menjadi Kepala Desa saya dan saya adalah warga Bapak, maka saya merasa wajib untuk mengucapkan selamat dan mendukung apa pun program bapak ke depan! Kunjungan itu mendapat sangkaan negatif dari para pendukungnya Pak Nur, mereka juga mengira Bapak hendak menjilat. Tapi itu tidak masalah, bukankah setiap tindakan punya risikonya masing-masing? Bagusny, Pak Nur tahu kalau Bapak tulus, dan dia justru menyambut Bapak dengan baik dan menaruh hormat pada Bapak sampai sekarang.

Buktinya, setiap kali Pak Nur mau menyewakan sawahnya secara musiman, warga yang pertama kali ditawarkan adalah Bapak. Tidak tanggung-tanggung, dia yang langsung datang kemari. Padahal sebagai Lurah, dia bisa saja memajang pengumuman di kantor dan menerapkan sistem ‘siapa cepat dia dapat’. Pak Nur terus begitu sampai masa jabatannya habis.”

“Lalu bagaimana dengan teman-teman Bapak di selatan?”

“Ada yang kemudian mengikuti jejak Bapak. Ada juga yang masih fanatik dan tidak mau bertegur sapa dengan Pak Nur atau para pendukungnya sampai sekarang. Mereka yang fanatik mengira bahwa itu adalah keteguhan sikap, tapi sebenarnya mereka hanya mempersulit diri sendiri. Pesanku, silakan saja kamu mendukung salah satu kelompok yang

sedang bersaing dengan kelompok lain, tapi jangan sampai menjadi seperti teman-teman bapak yang fanatik itu.”

“Baik, Pak.”

Kopi kami datang. Dan kembalinya ibu saya ke ruang belakang, percakapan saya dengan bapak berlanjut ke beberapa kisah lain tentang desa kami di masa lalu. Kisah-kisah yang akan sangat menarik untuk diceritakan kembali, tapi lain waktu.



MEREKA YANG FANATIK MENGIRA BAHWA ITU ADALAH KETEGUHAN SIKAP, TAPI SEBENARNYA MEREKA HANYA MEMPERSULIT DIRI SENDIRI.

Komik
BANG PEPE



*HARI TAQWAN SANTOSO, tinggal di Yogyakarta. Aktif sebagai volunteer Global Village untuk Habitat for Humanity Yogyakarta. Pernah menerbitkan novel The Jazab Boy (Diva Press, 2012), Mandaraka (RWTC, 2017) Antologi Puisi Teruntuk Mentari dan Rembulan (Bebook Publisher, 2016), Sajak-Sajak Rembulan Biru (WA Publisher, 2017). Penulis dapat dihubungi lewat wa : 08987766859 atau email : narasoma7@gmail.com.

Penataan Jabatan Fungsional di BPP Kemendagri

Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selama ini bekerja dengan struktur, dan tupoksi yang hampir tidak pernah berubah dalam kurun sekian waktu. Titik berat organisasi masih berfokus pada kerja struktural. Organisasi dengan tata kerja yang menitikberatkan kerja fungsional belum menjadi keutamaan. Ini tercermin dalam struktur, nomenklatur, dan tata kerja, setiap jabatan yang ada di BPP. Jumlah orang dan anggaran yang dialokasikan pun belum sesuai dengan struktur dan cara kerja organisasi fungsional.



Padahal, sebagai organisasi kelitbangan yang berfokus pada cara kerja fungsional, BPP harus bertransformasi menjadi organisasi yang fungsional. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) adalah contoh konkret yang patut ditiru oleh BPP dalam merumuskan struktur dan tata kerjanya. Atau, minimal BPP Kemendagri dapat meniru Inspektorat Jenderal (Itjen) yang ada di Kemendagri yang sudah bekerja secara fungsional. Hal ini ditandai dengan berkurangnya jabatan struktural dan semakin kuatnya kapasitas fungsional auditor yang ada di Itjen Kemendagri.

Kalau fokus dan tata kerja BPP Kemendagri masih berkuat pada struktural (kebanyakan pejabat eselon tiga dan empat), agaknya sukar bagi BPP untuk mencapai *peak performance* yang diidamkan. Pasalnya, kerja secara struktural itu tidak lazim dan berpotensi menghambat kinerja BPP yang sejak awal memiliki tupoksi sebagai lembaga kelitbangan (fungsional) yang menunjang kinerja Menteri Dalam Negeri dan setiap Komponen yang ada di Kemendagri.

Terlebih lagi, masih ada beberapa nomenklatur jabatan (terutama di Sekretariat) dan tupoksi yang belum terumuskan secara tepat (terutama di Puslitbang) berikut penganggarannya, sehingga memengaruhi output kinerja dan proses pengukuran kinerja di setiap jabatan. Oleh karenanya, wacana penyederhanaan birokrasi dengan memangkas jabatan eselon III dan IV di organisasi pemerintah, menjadi momentum bagi BPP untuk mereformasi dan merevitalisasi dirinya sendiri.

Kendati begitu, mengalihkan pejabat struktural menjadi fungsional bukanlah perkara mudah. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu, serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya dengan angka kredit. Jadi, tidak ada jabatan fungsional yang “instan”, harus ada modal kom-

petensi spesifik.

Konsekuensi logis dari pemangkasan eselon III dan IV itu menjadikan BPP Kemendagri tidak lagi mengenal nomenklatur Bidang/Bagian, dan Sub Bidang/Sub Bagian. Para pejabatnya beralih tugas menjadi pejabat fungsional. Persoalannya, apakah para Kepala Bagian/Bidang dan Sub Bidang/Sub Bagian itu otomatis dapat dialihkan posisinya menjadi fungsional peneliti atau analis kebijakan, seperti rancangan awal Biro Kepegawaian dan Biro Organisasi dan Tatalaksana Kemendagri? Jawabannya, tentu saja tidak bisa.

Untuk menjadi seorang peneliti, misalnya, dibutuhkan kualifikasi tertentu seperti yang dipersyaratkan dalam Peraturan LIPI No 20 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti. Sebagai contoh, untuk pindah ke jabatan fungsional peneliti ahli pertama, muda, atau madya, yang bersangkutan (ybs) harus memiliki kualifikasi pendidikan Strata 2. Sementara, di BPP masih ada 8 orang Kepala Sub Bidang yang hanya memiliki kualifikasi pendidikan Strata 1. Dengan begitu, mereka tentu tidak bisa secara otomatis dimasukkan ke dalam jabatan fungsional peneliti.

Selain itu, untuk masuk ke jenjang peneliti tertentu ybs juga harus mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun LIPI. Ditambah lagi, yang bersangkutan wajib memenuhi hasil kerja minimal sesuai jenjang jabatan yang dituju dan diperoleh dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir dari pengusulan. Contoh, untuk menjadi peneliti muda, seorang Kepala Sub Bidang harus pernah memimpin sebuah proyek penelitian yang dibuktikan dengan SK sebagai Ketua Tim Peneliti. Yang bersangkutan juga wajib pernah menjadi pembicara dalam sebuah seminar/konferensi ilmiah eksternal instansi sebanyak dua kali, dan menjadi kontributor utama dalam penulisan karya ilmiah (tiga artikel ilmiah) yang dipublikasikan di jurnal ilmiah elektronik terakreditasi dan terindeks nasional. Untuk menjadi peneliti madya, bagi pejabat eselon III, persyaratannya lebih kurang sama dengan peneliti muda, hanya saja skopnya harus internasional, minimal terindeks global dengan jumlah yang lebih banyak dari pada persyaratan peneliti muda. Lantas, apakah para pejabat eselon III dan IV di BPP memiliki modal itu? Belum lagi kalau sudah diterima sebagai peneliti, mereka wajib sanggup memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan dalam kurun 4 tahun.

Bagi para Kepala Bagian dan Sub Bagian di Sekretariat BPP

dan Sub Bagian Tata Usaha di Puslitbang pun, kesemuanya juga harus beralih (tanpa terkecuali) ke jabatan fungsional tertentu. Intinya, tidak boleh ada lagi jabatan struktural eselon III dan IV di Sekretariat. Profil Jabatan Fungsional PNS yang dikeluarkan Direktorat Jabatan ASN Badan Kepegawaian Negara (BKN) 2019 sebagai acuannya. Jadi, ada banyak jabatan fungsional (195 jabatan yang tersedia) yang bisa dipilih oleh ybs untuk beralih status dari jabatan struktural. Dan, jabatan fungsional itu harus dipilih secara sadar oleh ybs sendiri, bukan diarahkan atau dipikirkan, apalagi dipaksa untuk beralih ke jabatan fungsional yang ditentukan secara sepihak. Konsekuensinya, ybs bisa memilih tempat (Komponen) ia bekerja. Alih jabatan harus berdasar pada minat dan “modal” yang dipersyaratkan oleh jabatan fungsional yang dituju. Dengan demikian, rancangan awal jabatan fungsional yang disusun Sekretariat Jenderal Kemendagri melalui Surat Sekretaris Jenderal Kemendagri yang ditandatangani Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana No 061/13855/SJ tertanggal 11 Desember 2019 tentang Rencana Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kemendagri dan BNPP harus ditinjau ulang.

Lebih jauh, untuk mengoptimalkan kerja kelitbangan yang digarap BPP dan menindaklanjuti pidato Menteri Dalam Negeri dalam Rakornas Litbang pada 21 November 2019 lalu yang dibacakan Kepala BPP Kemendagri yang isinya menyinggung perlunya penerapan teknologi dan publikasi yang canggih dan masif, BPP perlu mengadakan jabatan fungsional teknisi penelitian dan perekayasa dan pranata komputer. Hal ini penting, sebab BPP harus menjadi pusat data dan informasi terkait pemerintahan dalam negeri. Untuk itu, pemanfaatan teknologi informasi di BPP Kemendagri tidak bisa ditawar lagi. Pengelolaan *website* yang mudah diakses publik, keberadaan perpustakaan yang modern, laboratorium data, sarana publikasi, dan sebagainya harus sudah berbasis teknologi.

Sarana dan prasarana seperti itu harus menjadi prioritas. Keberadaannya menjadi determinan keberhasilan proses penelitian dan pengembangan. Dengan teknologi informasi semua proses kelitbangan dilakukan saling terkait, dari mulai proses penelitian hingga sarana publikasi bisa tersaji dengan maksimal, sehingga dapat menghemat waktu dan anggaran. Melalui pemanfaatan teknologi mutakhir, misalnya, pengumpulan data untuk penelitian tidak harus menunggu lama. Dengan laboratorium data yang canggih berbagai data bisa ditemukan dengan mudah. Melakukan survey, hingga wawancara dengan narasumber bisa dilakukan di sana. Selain itu, dengan laboratorium data, nantinya hasil-hasil penelitian tidak hanya selesai di dokumen saja, tetapi bisa disajikan dalam bentuk infografis, videografis, dan sebagain-

ya, serta menjadi dokumen penting untuk kebutuhan jangka panjang.

Alih jabatan struktural ke fungsional (utamanya peneliti) ternyata rumit. Ada banyak regulasi yang dihadapi. Kalau Sekretariat Jenderal ingin tetap memaksakan kebijakan itu, Kemendagri harus mau berkoordinasi dan berani bernegosiasi dengan instansi pembina jabatan fungsional agar semua regulasi yang berkenaan dipertimbangkan lagi keberadaannya. Artinya, ada pengecualian dan pengurangan persyaratan untuk tahap awal program ini. Sebab, jika tidak, agaknya mustahil bagi para pejabat eselon IV dan III itu, dalam waktu yang singkat, mampu memenuhi semua persyaratan yang diminta oleh instansi pembina jabatan fungsional yang dituju.

BPP Kemendagri melalui Biro Kepegawaian dan Biro Organisasi dan Tatalaksana wajib melakukan penataan dan telaahan organisasi dan personil secara komprehensif. Harus dihitung secara cermat, seberapa banyak pegawai yang dibutuhkan BPP untuk beban kerja yang selama ini diemban. Kemudian, dipetakan seberapa banyak jumlah dan macam jabatan struktural dan fungsional yang harus dimiliki. Sehingga tidak terjadi penumpukan jabatan fungsional tertentu (baik di BPP Kemendagri maupun Komponen lainnya). BPP harus merujuk beberapa peraturan yang relevan. Misalnya, pegawai BPP tidak semuanya harus pindah jabatan menjadi peneliti. Hal ini bisa dilakukan dengan cara inpassing dengan merujuk PermenPAN-RB No Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional/Inpassing.

Kalau pun porsi jabatan fungsional peneliti lebih banyak dari jabatan fungsional lainnya, BPP wajib bersandar pada Peraturan BKN No 9 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Peneliti, khususnya pada Pasal 11 yang mensyaratkan penetapan kebutuhan PNS dalam jabatan fungsional peneliti dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator jenis bidang kepakaran dan ruang lingkup kelompok kegiatan.

BPP tidak boleh hanya berkonsentrasi pada penataan jabatan fungsional keahlian. Perlu dipertimbangkan juga para pegawai (yang jumlahnya juga tidak sedikit) yang selama ini sebagai fungsional umum. Mereka harus dipersiapkan untuk menyandang predikat fungsional keterampilan. Selama ini, wacana yang bergulir hanya pada tataran fungsional keahlian, padahal fungsional keterampilan juga patut diperhitungkan. Hal ini luput dari perhatian Biro Organisasi dan Tatalaksana dan Biro Kepegawaian Kemendagri.

Moh Ilham A Hamudy
Kepala Bidang Ekonomi Daerah
Puslitbang Pembangunan dan Keuda
BPP Kemendagri



Membendung Resistensi Penyederhanaan Birokrasi

AWAL periode kedua pemerintahan-nya, Presiden Joko Widodo berencana memangkas alur birokrasi pemerintahan dengan menyederhanakan tingkat eselon pejabat negara demi meningkatkan kepercayaan pelaku bisnis dan investor. Penyederhanaan birokrasi digadang-gadang bakal mampu mempercepat pengambilan keputusan, menghemat anggaran, hingga meningkatkan investasi.

Saat ini jumlah eselon dianggap terlalu banyak dengan empat level eselon dalam jabatan struktural di pemerintahan. Untuk itu, Presiden Jokowi akan memangkas hanya menjadi dua eselon. Nantinya jabatan itu akan diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi. Penyederhanaan juga diharapkan mampu membuat lentur sistem birokrasi. Penyederhanaan birokrasi merupakan upaya untuk meminimalisasi hambatan dalam pelayanan publik karena adanya peraturan yang saling tumpang tindih dan tidak efektif.

Proses birokrasi di Indonesia, memang selama ini kerap menjadi sorotan, berbelitnya birokrasi adalah alasan utama penurunan realisasi arus investasi yang masuk. Buruknya birokrasi Indonesia juga ditegaskan Bank Dunia. Prosedur yang dilewati pelaku usaha untuk berusaha di Indonesia kurang lebih 10 tahapan dengan estimasi waktu 19,6 hari. Lebih panjang ketimbang Singapura yang hanya dua tahapan dengan waktu 1,5 hari. Bahkan, proses birokrasi Vietnam—negara tetangga yang sedang naik daun dalam menarik investasi—lebih baik ketimbang Indonesia, yakni hanya delapan tahapan dengan estimasi waktu prosedur sekitar 17 hari.

Untuk mendukung langkah tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) juga telah menerbitkan Peraturan Menteri PANRB No 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi



ke dalam jabatan fungsional. Regulasi itu menjadi dasar langkah strategis pemerintah untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya akselerasi layanan publik.

Melaksanakan keputusan Presiden untuk memangkas jenjang eselon juga tidak mudah. Selain lama waktu yang dibutuhkan pemerintah untuk merampingkan struktur di pemerintahan,

wacana efisiensi tersebut akan mendatangkan pro dan kontra, terutama di kalangan para pegawai di pemerintahan. Dengan mereformasi struktur nantinya, sebanyak 430 ribu pejabat eselon tiga sampai lima akan kehilangan jabatannya. Di sisi lain, perubahan dari pejabat struktural menjadi fungsional, akan mendatangkan konsekuensi pegawai berpangkat eselon tiga ke lima bisa kehilangan tunjangan.

Penyederhanaan restruktur organisasi juga menjadi sesuatu yang mengecewakan bagi sebagian pegawai. Terutama bagi para pegawai yang lemah kompetensi dan tidak profesional di sebuah instansi pemerintahan. Penyederhanaan struktur menjadi momok menakutkan. Palsalnya tidak sedikit para pegawai pemerintah tidak memiliki kesiapan dan perencanaan karier yang baik. Mereka juga dianggap tidak mampu membaca arah perubahan zaman dengan memperhatikan tanda-tandanya.

Perubahan tersebut juga bisa saja menjadi resistensi, yang memunculkan gerakan tak kasat mata dalam melawan perubahan untuk tetap berada dalam posisi mentok (*status quo*). Sayangnya hal tersebut tidak bisa dilakukan para pegawai yang dikecewakan oleh dirinya sendiri. Mengingat saat ini, mereka sudah dipaksa mengikuti perubahan.

Perubahan yang sudah terjadi memang tidak bisa dicegah. Sistem yang ada harus menyesuaikan perubahan yang ada. Oleh sebab itu, perlunya para pegawai pemerintah memilih pergerakan yang dinamis dalam merespons berbagai kondisi perubahan yang terjadi. Pegawai sebaiknya tidak

perlu resisten, Namun akan lebih baik jika menyiapkan diri dengan melakukan peningkatan profesionalisme diikuti integritas dirinya dengan subansi fungsional bagi pegawai khusus. Hal ini berlaku bagi semua instansi pemerintah tidak terkecuali di Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (Badan Litbang Kemendagri)

Perubahan yang datang, perlu direspons dengan baik agar Badan Litbang Kemendagri tidak terbawa arus, melainkan dapat mendayung di atas arus. Jika kita mau sedikit membaca, sebetulnya banyak opsi bagi Badan Litbang Kemendagri. Badan Litbang bisa memanfaatkan tanda-tanda perubahan pengetahuan dengan penerapan *Internet of Things* (IoT). Badan Litbang Kemendagri sebagai suatu lembaga perlu memilih pendekatan dan pemahaman baru, melalui penukaran mekanisme pola kerja, target penugasan, dan pembaruan terhadap perannya.

Salah satu pendekatan pengetahuan tersebut, bisa dilakukan melalui adopsi dimensi *knowledge management*. Pengaplikasian dimensi tersebut akan menghasilkan pembaruan di Badan Litbang Kemendagri. *Knowledge management* nantinya akan menggantikan peran Badan Litbang yang selama ini masih berkuat di *management think-tank* yang hanya menyiapkan kebijakan. Dengan penerapan *knowledge management*. Di mana yang tadinya hanya menghasilkan kertas-kertas kebijakan (*policy papers*) akan berubah dengan sendirinya menjadi pengguna pengetahuan sebagai pondasi dasar dalam kebijakan, regulasi, dan inovasi. Tentu saja itu bisa terjadi dengan melibatkan IoT sebagaimana yang telah disinggung di atas.

Tidak bisa dimungkiri, penggunaan IoT serta teknologi informasi menjadi tanda-tanda perubahan zaman saat ini. Paduan tersebut (IoT dan *knowledge management*) diharapkan bisa menghasilkan konstruksi pembaruan bagi Badan Litbang Kemendagri beserta keluaran (*output*) yang dihasilkan. Harapan tersebut bukan tanpa alasan, pasalnya *knowledge management*, dapat menyajikan empat aspek yang menjadi pilar dalam konstruksi baru kelembagaan Badan Litbang Kemendagri. Hal tersebut terdiri dari 1) penciptaan pengetahuan; 2) penyebarluasan pengetahuan, 3) implementasi pengetahuan dan 4) repositori pengetahuan. Aspek tersebut nantinya menjadi dasar bagi pembentukan tugas baru dalam Badan Litbang dalam merespons perubahan yang terjadi.

Imam Radianto Anwar
Peneliti Muda Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam Negeri



Dengan begitu, Badan Litbang Kemendagri tidak melulu mengurus inovasi, tetapi juga dapat memenuhi kebutuhan lainnya. Seperti, penggunaan dan pemanfaatan digitalisasi dalam pemerintahan, menjadi inkubator dari setiap inovasi hasil kegiatan penelitian dengan *output* inovasi, dan menjadi katalisator dalam penyiapan kebijakan pada tiap agenda Kementerian Dalam Negeri. Tidak lupa, Lembaga Badan Litbang juga menjadi lembaga pengayaan sistem pengambilan keputusan dalam menentukan arah desentralisasi, juga menjadi harapan nyata untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Itu semua bisa dilakukan ketika proses pengambilan kebijakan dilakukan berbasis pengetahuan melalui pembangunan dan pemanfaatan *big data*.

Di lain pihak, pengetahuan harus dikelola dengan baik. Pengelolaan pengetahuan membutuhkan pengembangan organisasi yang memahami pekerjaan sebagai *chief knowledge officer*. Pemahaman tersebut bertujuan untuk menjaga keberlangsungan pengelolaan *knowledge management* dalam Badan Litbang Kemendagri nantinya. Pemahaman tersebut juga melekat pada uraian tugas dan fungsi jabatan dan seluruh pegawai, yang pada akhirnya *knowledge management* menjadi sesuatu yang melekat dan menjadi budaya hidup dalam organisasi.

Dengan demikian, tidak ada lagi kepanikan bahkan kekecewaan bagi para pegawai khususnya segenap elemen-Badan Litbang Kemendagri dalam merespons perubahan zaman yang terjadi.

Tidak ada salahnya jika para pegawai mendukung perubahan, jika itu bisa membuat lebih baik. Bisa jadi, adanya disorientasi pembangunan masyarakat adalah bentuk kegagalan birokrasi dalam menjalankan fungsi dan peranannya. Sifat birokrasi yang berfungsi sebagai penanggung jawab pembangunan ekonomi sosial sangat membutuhkan dorongan dan energi yang cukup untuk mengeksekusi tugas-tugas secara tepat waktu dan efisien. Kapasitas birokrasi yang memainkan peran dinamis dalam proses pembangunan akan sangat ditentukan oleh seberapa besar dorongan motivasi atau etos kerja yang dimiliki para individu di tubuh birokrasi. Bagaimanapun juga, nilai-nilai dorongan untuk maju akan menumbuhkan budaya kerja dinamis di tubuh birokrasi.

Delusi Jabatan Fungsional

SAYA teringat saat seseorang menelpon saya untuk minta difasilitasi dalam proses peralihan jabatan fungsional. Kebetulan ia ingin beralih dari jabatan struktural ke jabatan fungsional peneliti melalui skema penyetaraan/*inpassing*. Memang skema *inpassing* kala itu sedang dibuka besar-besaran untuk seluruh jabatan fungsional. Seseorang tersebut merupakan pegawai dari Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Saya layani perbincangan dengan nada skeptis. Sikap saya itu terjadi karena ia bukanlah orang pertama yang meminta difasilitasi mengenai hal itu.

Sudah berkali-kali saya melayani perbincangan mengenai keinginan pegawai dari berbagai pemerintah daerah, untuk ikut dalam proses penyetaraan jabatan fungsional. Namun selalu sama, mereka hanya bermodalkan niat tapi nir-kompetensi dan pengalaman. Meski begitu, konsultasi tersebut tetap saya layani sambil menjelaskan mengenai rumitnya persyaratan dan proses peralihan jabatan tersebut. Orang tersebut tiba-tiba memotong di tengah penjelasan dengan nada yakin,

“Saya siap mas, segala berkas portofolio peneliti sudah saya siapkan”. ujanya.

Saya pun men“iya”kan “Oke baik, kirimkan saja portofolio Bapak, saya akan segera bantu proses secepatnya, kalau memang sudah sesuai dengan ketentuan.” Jawab saya mengakhiri pembicaraan siang itu.

Lantas saya pelajari berkas demi berkas portofolio peneliti yang ia kirimkan. Gelar akademis Magister dan Doktor ia dapatkan dari Jepang dengan berbagai judul publikasi ilmiah internasional yang sama sekali tidak saya pahami. Bukan karena berbahasa asing, namun karena banyak sekali kosakata fisika yang pasti butuh ilmu untuk membacanya.

Semua pengalaman ilmiah itu lebih dari cukup untuk dia masuk dalam jabatan fungsional peneliti yang diinginkannya. Namun proses proses untuk *inpassing* ternyata tidak hanya itu. Masih ada tahapan selanjutnya yaitu wawancara selama berjam-jam dengan penguji para akademisi *gaek*. Mereka sudah pasti akan menanyakan sejauh mana kedalaman pemahamannya terhadap fokus bidang ilmu yang digeluti.

Singkat cerita, dia lulus dan menjadi satu-satunya pegawai penda yang memenuhi syarat menjadi seorang peneliti melalui jalur *inpassing*. Instansi Pembina kala itu *kekeuh* menerapkan standar tinggi terhadap kualifikasi fungsional peneliti. Mereka berprinsip *quality over quantity*, dan semua yang sudah duduk menjadi jabatan fungsional peneliti merupakan orang yang memang sudah memiliki modal keahlian yang ditentukan.

Dua tahun setelah itu, Presiden Joko Widodo berniat ingin menghapus jabatan eselon III dan IV di instansi pemerintah. Ia beranggapan eselonisasi yang terlalu Panjang akan menghambat pelayanan birokrasi. Dua eselonisasi tersebut akan dialihkan menjadi jabatan fungsional. Alasannya pemerintah lebih menghargai keahlian dan kompetensi. Skema pengalihan masih sama melalui skema penyetaraan. Saya yang sudah pernah berkecimpung dalam menangani jabatan fungsional sebelumnya, menyambut baik kebijakan tersebut. Saya tahu betul bagaimana tata kerja dan pola karir jabatan fungsional yang memang lebih profesional.

Namun sayang, penerapan kebijakan tersebut tahun ini teras dipaksakan dan terburu-buru. Pemangkasan tersebut akan berdampak pada sekira kurang lebih 439 ribu eselon 3 dan 4 di seluruh Indonesia akan dialihkan dalam jabatan fungsional. Peraturan Menpan No 28/2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional menjadi aturan teknis untuk mengakomodasi hal itu. Pemerintah menggunakan pendekatan *one size fits all* dalam skema penyetaraan ini, di luar pakem skema penyetaraan yang selama ini saya pelajari, tanpa syarat portofolio, tanpa uji kompetensi, tanpa syarat akademis, bahkan pegawai tidak bisa memilih ke mana ia ingin berkarir. Semua pejabat dipaksakan duduk dalam fungsional terlebih dahulu, baru syarat kompetensi perlahan dipenuhi.

Hati saya masih galau saat menuliskan artikel ini. Kebetulan, saya merupakan salah satu pejabat yang terkena dampak tersebut. Bukan saya *syndrome* terhadap jabatan administrasi yang akan hilang. Sudah saya utarakan bagaimana sikap saya terhadap kebijakan ini. Namun, saya belum layak untuk menjadi seorang fungsional pustakawan karena tidak memiliki *basic* pendidikan dan pengalaman kerja dalam dunia perpustakaan.

Hal ini tentu akan menghambat kinerja dan sulit sekali bersaing dalam bidang ini. Saya lantas merasa tersindir sendiri dengan celotehan skeptis terhadap para pegawai penda yang dulu sempat ingin menjadi fungsional peneliti. Saat itu saya sesekali melontarkan nada “*ngece*” terhadap kompetensi mereka yang tidak sesuai dengan jabatan yang akan ia tuju. *Nah* sekarang *kok* saya kesetrum sendiri dengan perkataan dua tahun lalu itu. Lain halnya ketika profil kompetensi saya sama dengan pegawai dari Sulawesi Utara sebelumnya, tentu Saya akan mendongakan kepala dengan “*pede*” karena merasa akan mampu berkinerja secara profesional. Namun sebagai abdi negara yang baik, saya berpegang pada peribahasa “*Pbedientia Sicut Cadaver*”, taatlah seperti mayat, lakukan tanpa komplain. Mari kita sukseskan.

■ AJI NUR CAHYO

INFORMASI KELITBANGAN DALAM SATU SENTUHAN



LITBANG.KEMENDAGRI.GO.ID

@badanlitbangkemendagri



Badan Litbang Kemendagri

@LitbangKDN



@badanlitbangkemendagri

@badanlitbangkemendagri



CALL FOR PAPERS



JURNAL BINA PRAJA / MAY & NOV

THEME

“HOME AFFAIRS GOVERNANCE”

SUBTHEME

Regional Autonomy and Bureaucracy
Politics and Public Administration
Territorial Administration
and Rural Governance
Population and Civil Registration
Regional Election and Regional Innovation
Regional Fiscal Policy and Development
Other Issues in Public Administration

ACCREDITED NUMBER

21/E/KPT/2018 (SINTA 2)



TERMS & CONDITIONS

Open to the public | Manuscripts may contain the results of empirical or nonempirical research | Manuscripts should address the theme and subthemes set by the Jurnal Bina Praja Editorial Team | Submitted manuscripts have not been published in other media | Manuscripts should have a minimum of 38000-40000 character in Indonesian or English (preferably in English) | For the writing systematics and format, see <http://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jbp/index> | A minimum of 15 references taken from primary sources (scientific journals articles, dissertations, master's theses, undergraduate theses, and/or other research reports) | Attach biodata along with complete mailing address and contact number.

INDEXED BY:



RESEARCH AND DEVELOPMENT AGENCY
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

Jl. Kramat Raya 132, Jakarta Pusat
08812-1941-9885 | redaksijbp@gmail.com